



RESEARCH ARTICLE

UPAYA PENINDAKAN PELANGGARAN UNIT TURJAWALI SATUAN LALU LINTAS POLRES KLATEN UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS PADA KALANGAN PELAJAR

Sisilia Secsio Ginza Trisnawati¹✉

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ sisilia@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan lalu lintas yang terjadi merupakan faktor penghambat dalam pembangunan nasional. Sebagian besar permasalahan lalu lintas diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran pengguna jalan khususnya pelajar dalam berlalu lintas masih rendah terutama di wilayah hukum Polres Klaten. Penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan suatu upaya represif terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dilakukan apabila upaya preemtif dan preventif kurang optimal. Adanya penindakan pelanggaran lalu lintas ini di dasari oleh UU No. 22 tahun 2009 dan PP No. 80 tahun 2012 dengan harapan angka kecelakaan lalu lintas menurun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *Field Research* yaitu penelitian lapangan. Lokasi penelitian di Polres Klaten. Data/informasi berasal dari sumber primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Temuan penelitian pertama, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Klaten sudah optimal karena budaya masyarakat yang dapat memahami upaya kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, namun dalam upaya preventif pengaturan pagi, kurangnya personil lalu lintas, maka Polres Klaten memperbantukan dari unit lain untuk melaksanakan pengaturan pagi di titik – titik rawan maupun di depan sekolahan. Masih adanya oknum yang menerima suap dari masyarakat menunjukkan berkurangnya citra Polri dimata masyarakat. Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu perlunya dikjur kepada anggota yang belum pernah melaksanakan dikjur. Lebih dipantau kembali pada saat melaksanakan penindakan pelanggaran agar tidak ada yang menerima suap.

Kata Kunci: *Upaya, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Pelajar*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era globalisasi seperti saat ini dengan tingginya arus modernisasi globalisasi dan semakin pesat serta canggihnya sarana dan prasarana teknologi, sehingga berdampak juga dengan kemajuan dalam segala hal khususnya juga dalam bidang lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan berfungsi sangat strategis dalam mendukung program pembangunan nasional serta merupakan bagian dari upaya untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari suatu sistem transportasi nasional.

Di Indonesia kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang sering terjadi di jalan raya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, masalah tersebut disebabkan karena kendaraan dan kondisi jalan yang tidak memenuhi standar, akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas adalah mulai dari kerugian materiil maupun non materiil seperti kerusakan kendaraan, bangunan rusak/hancur yang berada dekat lokasi kecelakaan, cacat fisik, bahkan sampai kehilangan nyawa.

Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat dalam berkendara, dan adanya upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi keadaan tersebut, profesionalisme polri sangat menarik untuk ditingkatkan dalam pelayanan pada masyarakat, sesuai dengan program Kapolri yaitu profesional, modern, dan terpercaya yang terdiri dari 11 program yaitu :

1. Pemantapan reformasi internal Polri
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi
3. Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal
4. Peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan
5. Peningkatan kesejahteraan personel polri
6. Penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarpras
7. Penguatan harkamtibmas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
8. Pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas
9. Penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan
10. Penguatan pengawasan
11. Quick wins Polri

Pada program ke empat dari kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menekankan bahwa profesional polri menuju keunggulan yaitu peningkatan kualitas 8 (delapan) standar pendidikan POLRI yang terdiri dari evaluasi terhadap kompetensi hasil didik pada diktuk, dikbangum dan dikbangspes POLRI, dan Inventarisasi permasalahan dan kekurangan dalam 8 standar pendidikan POLRI pada seluruh satuan pendidikan. Yang kedua adalah peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan yang terdiri dari evaluasi terhadap perangkat dan metode latihan di seluruh satuan kerja markas besar dan satuan wilayah, menyusun hasil evaluasi terhadap perangkat dan metode pelatihan yang dilakukan selama ini, membuat rencana pelatihan fungsi secara periodik dan data pelatihan fungsi. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sistem manajemen kinerja. Untuk Profesional dalam hal ini adalah polri sebagai pelayan masyarakat, sesuai tugas polri yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal diatas merupakan dasar bagi anggota polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Salah satunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polri mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat merugikan diri sendiri maupun semua pihak. Upaya polisi untuk mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah banyak dan sudah terbagi dalam setiap bidangnya. Program Promoter Polri yang sekarang sedang dijalankan oleh KAPOLRI diusahakan untuk membantu Polri dalam melaksanakan tugasnya. Polri sendiri terbagi dalam beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi sabhara, kedua fungsi binmas, ketiga fungsi intel, keempat fungsi reserse, dan yang kelima adalah fungsi lalu lintas. Fungsi lalu lintas inilah yang sangat berhubungan dengan permasalahan masyarakat di Indonesia sekarang ini. Satuan Lalu lintas sangat mendukung guna mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pada Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan maka penyelenggaraan kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik dari aparat pemerintah dan swasta, Polri sebagai pihak pemerintah dan PT. Jasa Raharja sebagai pihak swasta. Polisi Lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas.

Pihak satuan lalu lintas berfungsi untuk pemeliharaan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan pencegahan kejahatan secara terpadu. Kemacetan lalu lintas menjadi meningkat ketika ditemukan berbagai kendaraan bermotor. Munculnya kemacetan di jalan raya merupakan dampak dari kebutuhan pengguna jalan dan juga volume kendaraan yang makin bertambah. Hal ini tampak dari arus lalu lintas yang kian memadat. Tidak hanya kemacetan saja yang berdampak dari volume kendaraan yang makin bertambah, namun kecelakaan lalu lintas juga semakin meningkat di Indonesia. Angka kecelakaan di Indonesia sangatlah tinggi, dapat dilihat dari data korlantas yang menunjukkan ada 24.642 jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Untuk Provinsi Jawa Tengah jumlah kecelakaan lalu lintasnya menempati urutan kedua setelah provinsi Jawa Timur, terdapat 4.842 kecelakaan yang terjadi pada setiap tahunnya di Provinsi Jawa Tengah. Untuk korban dari kecelakaan tersebut diduduki peringkat tertinggi oleh umur golongan 15 tahun sampai 19 tahun, yang berarti umur tersebut adalah umur pelajar sekolah SMP dan SMA. (Korlantas Polri <http://korlantas.polri.go.id/>)

Kecelakaan lalu lintas juga menjadi masalah pada wilayah hukum Polres Klaten, dengan keadaan wilayah Klaten yang luas dan ramai, menjadi jalur penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota pariwisata. Klaten berbatasan langsung dengan Kota Surakarta yang merupakan pusat perdagangan. Terdapat candi Prambanan, yang menjadi objek wisata pada Kabupaten Klaten yang menyebabkan banyaknya wisatawan dari dalam maupun luar negeri berdatangan ke Kabupaten Klaten.

Dengan demikian semakin rawanlah jalur lalu lintas Kabupaten Klaten, dan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar didalamnya. Korban kecelakaan lalu lintas merupakan objek tugas dalam pelaksanaan tugas Polri di bidang lalu lintas untuk mencegah hal tersebut. Oleh karena hal tersebut, peneliti merasa penting untuk mengamati dan meneliti mengenai peran satuan lalu lintas unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli dalam penindakan pelanggaran untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA di Kabupaten Klaten. Perkembangan kepolisian pada fungsi lalu lintas Polres Klaten

mengisyaratkan agar aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan yang optimal sehingga mampu menanggulangi ancaman keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satuan Lalu lintas harus bekerja sama dengan tenaga pendidik atau guru, untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar. Namun, pada Polres Klaten ini kerja sama tidak hanya dikhususkan kepada guru, orang tua siswa pun ikut ambil bagian dalam pentingnya taat lalu lintas pada pelajar.

Pelajar pada masa sekarang ini lebih menuntut untuk dibelikan kendaraan oleh orang tuanya untuk berangkat ke sekolah atau pergi dengan rekan sebayanya. Hal ini dikarenakan pihak sekolahan memperbolehkan siswa untuk membawa kendaraan pribadi ke sekolah, mulai dari sepeda, sepeda motor roda dua dan mobil. Karena hal tersebut, pelajar menempati urutan teratas pada kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Adanya kecelakaan tersebut didasari oleh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Klaten. Pelanggaran yang ada pada Polres Klaten cukup beragam untuk kalangan pelajar SMA. Pelajar lebih menonjolkan gaya untuk ke sekolah, sehingga malas untuk menggunakan spion standar, motor standar, dan juga helm standar. Adanya jalur satu arah di Kabupaten Klaten ini juga mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, contohnya adalah karena terburu – buru untuk berangkat ke sekolah pelajar yang seharusnya memutar terlebih dahulu untuk menuju ke sekolah mereka masing – masing, namun mereka terpaksa memotong jalan dan melawan arus. Tidak hanya itu fenomena yang terjadi di Klaten, karena kurangnya angkutan umum yang melintas di daerah Klaten, dalam pemberitaan media massa menunjukkan angkutan umum di Klaten berjumlah sedikit daripada di Kabupaten lain.

Berdasarkan izin trayek, jumlah angkutan umum, meliputi angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan pedesaan jumlah totalnya 458 unit. Namun, yang benar-benar beroperasi paling hanya sekitar 40%-nya. Semakin sepi penumpang, penghasilan perusahaan angkutan tidak mampu menutupi biaya operasional kendaraan mereka, seperti pembelian bahan bakar minyak maupun perangkat suku cadang kendaraan. Hal ini menyebabkan pengusaha jasa angkutan di Klaten terpaksa mengurangi jatah operasional. (Klaten.Info, 03 April 2017, URL)

Berdasarkan berita tersebut pelajar mau tidak mau harus menggunakan sepeda motor untuk berangkat menuju ke sekolah, walaupun ada beberapa pelajar yang belum memiliki SIM. Dibutuhkan upaya-upaya pihak kepolisian untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas pada pelajar tersebut. Maka penulis membuat penulisan dengan judul “Upaya unit turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA”

1.1 Rumusan masalah

Polres Klaten merupakan tujuan utama lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan latar belakang diatas yang melatar belakangi pelanggaran lalu lintas, banyak pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, hal itu dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya sadar berlalu lintas. Selain dari hal tersebut, penulis lebih mengedepankan upaya - upaya satuan lalu lintas dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Dengan mengambil penelitian ini, harapan mengenai upaya satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar dapat disajikan dalam penulisan ini. Untuk dapat mengetahui secara langsung “Bagaimana upaya unit turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA” penulis akan melakukan penelitian untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang terkait dengan judul penelitian, diantaranya adalah :

1. Bagaimana upaya unit turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA?

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi unit turjawali satuan lalu lintas polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA?

1.2 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai upaya penindakan pelanggaran unit turjawali satuan lalu lintas polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Pertama, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh unit turjawali satuan lalu lintas polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kabupaten Klaten.

Kedua, untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi unit turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikembangkan, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu kepolisian khususnya pada penindakan pelanggaran bidang lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pimpinan Polri secara umum dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas pelajar, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar. Untuk Polres Klaten, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kegiatan penindakan pelanggaran terhadap pelanggaran lalu lintas guna menekan angka pelanggaran lalu lintas pada pelajar. Terhadap masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penindakan pelanggaran lalu lintas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Klaten, dan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas pada masyarakat Klaten.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau literature review dalam suatu studi penelitian adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti, serta menghindarkan dari duplikasi penelitian (Conny R. Semiawan , 2010).

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dijadikan bahan referensi di dalam penulisan ini. Hal ini dikarenakan penelitian tersebut memiliki topik yang sama. Referensi penelitian tersebut merupakan literature berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Ada beberapa penelitian yang dinilai sejalan dengan penelitian dan dijadikan sebagai bahan referensi adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama yang dijadikan sebagai bahan referensi penulisan ini yaitu penelitian oleh Muthia Kansa Nurwijaya (2016), beliau merupakan taruna akademi Kepolisian angkatan 47 dengan judul skripsi “Optimalisasi penindakan pelanggaran lalu lintas dalam rangka

menekan angka kecelakaan lalu lintas di Polres Gresik.” Penelitian yang ditulis oleh Muthia Khansa Nurwijaya tersebut membahas mengenai optimalisasi penindakan pelanggaran untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Polres Gresik.

Diharapkan dengan adanya perhatian lebih dari pimpinan untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran maka anggota sat lantas Polres Gresik lebih baik dalam menjalankan tugasnya sehari – hari. Saran yang diberikan penulis adalah agar kasat lantas mendata mengenai sarana dan prasarana yang kurang sehingga dapat dilakukan pengajuan kepada anggota Polda agar menunjang kinerja anggota dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Dari hasil penelitian ini dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu :

1. Persamaan
 - a. Tema penulisan yang dibahas sama-sama membahas mengenai satuan lalu lintas.
 - b. Tujuan penulisan sama-sama untuk mengurangi ketidak tertiban berlalu lintas, agar masyarakat tertib dalam berlalu lintas.
 - c. Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam melaksanakan penulisan.
2. Perbedaan
 - a. Lokasi yang digunakan dalam penelitian Muthia Khansa Nurwijaya bertempat di Polres Gresik, sedangkan lokasi yang digunakan penulis di Polres Klaten.
 - b. Fokus penelitian yang dilakukan Muthia Khansa Nurwijaya adalah cara mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh sat Lantas Polres Gresik, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah upaya unit turjawali satuan lalu lintas polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas Polres Klaten.
 - c. Penelitian yang ditulis oleh Muthia Khansa Nurwijaya menggunakan teori kinerja dan untuk peneliti menggunakan teori manajemen POAC.

Penelitian kedua yang dijadikan bahan referensi penulisan ini adalah penelitian oleh Friska Nufrida Romadona (2015) Taruna akademi Kepolisian Angkatan 46 dengan judul skripsi “Optimalisasi penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar oleh unit Turjawali sat lantas dalam rangka menciptakan kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta” Penelitian yang ditulis oleh Friska Nufrida Romadhona membahas mengenai optimalisasi penindakan pelanggaran untuk menciptakan kamseltibcar lantas.

Diharapkan dengan adanya penindakan pelanggaran oleh unit Turjawali, dapat tercipta kamseltibcar lantas pada wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Saran yang diberikan oleh penulis bagi masyarakat khususnya pelajar diharap kann sadar untuk lebih disiplin, mematuhi peraturan dan rambu – rambu lalu lintas, baik ada petugas polisi lalu lintas ataupun tidak karena demi keselamatan diri sendiri.

Dari hasil penelitian ini dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya dengan penulisan ini, yaitu :

1. Persamaan
 - a. Persamaan penelitian Friska Nufrida Romadhona dengan penulisan ini adalah penelitian ini sama-sama memiliki objek penelitian tentang berdisiplin lalu lintas pada pelajar.
 - b. Persamaan yang kedua adalah penulis sama-sama menggunakan metode Kualitatif.
2. Perbedaan
 - a. Perbedaan pertama adalah perbedaan tempat penelitian
 - b. Perbedaan kedua adalah penulisan pertama menggunakan teori efek jera, untuk penulis sendiri menggunakan teori Manajemen POAC.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual ini berisi tentang konsep – konsep berhubungan dengan permasalahan. Kerangka konseptual merupakan pedoman dalam penelitian, agar penelitian dapat dilakukan sesuai arah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep-konsep yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2.2.1 Teori Manajemen

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang saling bekerja sama, untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan manajemen yang baik. Kegiatan suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif dengan adanya manajemen. Manajemen yang baik dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada di dalam suatu organisasi.

Suatu organisasi memerlukan manajemen yang baik. Manajemen tersebut terdiri dari empat instrumen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* atau lebih dikenal dengan sebutan POAC. Instrumen tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan manajemen sekaligus untuk membedakan antara manajer dan non-manajer. (George R Terry 2013 :16).

Penjabaran lebih luas mengenai instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan pada umumnya berupa aspek administrasi. Perencanaan tersebut merupakan tahap penentuan strategi, pemilihan metode yang cocok dan penentuan sarana, prasarana dan anggaran untuk program yang akan dilaksanakan. Keberhasilan perencanaan bergantung pada informasi mengenai program yang akan dilaksanakan. Perencanaan bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana, oleh siapa dari program yang dilaksanakan.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses mempersatukan komponen-komponen dalam suatu organisasi dan mengatur komponen-komponen tersebut agar dapat melaksanakan kegiatan dari program yang akan dilaksanakan, untuk mencapai tujuan. Pada tahap pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personel agar program yang dilaksanakan lebih efektif.

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan tahap menggerakkan atau melaksanakan program yang telah direncanakan dan telah diorganisir sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

d. *Controlling* (pengendalian)

Proses pengendalian merupakan kegiatan mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan dari program yang telah direncanakan. Evaluasi tersebut dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya.

Setiap organisasi memerlukan manajemen. Manajemen tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing anggota organisasi, memperbaiki mutu manusia dan memperbaiki sistem kerja yang bertujuan untuk mencapai apa yang diharapkan. Manajemen dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan dari kegiatan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*) sebagai sumber daya yang harus dimiliki oleh organisasi. *Tools* tersebut dikenal dengan 6 (enam) M, yaitu :

e. *Men*, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan, manusia pula yang membuat yang membuat proses untuk mencapai tujuan.

f. *Money*, atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berhubungan dengan berupa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

g. *Material*, terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dibidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana.

h. *Machine*, atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

i. *Method*, adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer.

j. *Market*, adalah tempat dimana organisasi menyebarluaskan produknya.

2.2.2 Teori Motivasi

Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam lima tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar, sampai motif psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting:

- Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
- Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
- Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
- Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan)
- Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya)

2.2.3 Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa pengertian dari lalu lintas adalah pergerakan orang dan barang dengan atau tanpa alat angkut baik bermotor maupun tidak dalam sistem lalu lintas. Dalam sistem lalu lintas terdapat 3 unsur penting yang mengakibatkan terciptanya lalu lintas.

- Kendaraan dengan muatannya. Kendaraan merupakan sarana untuk Bergeraknya muatan, yang bisa berupa orang, hewan, atau barang. Kendaraan berdasarkan tujuan dasar dibagi menjadi 3 bagian angkutan yaitu angkutan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang.
- Prasarana adalah nama untuk lintasan dimana kendaraan itu bergerak diatasnya, misalnya : jalan dan semua fasilitas yang dibuat untuk bergerak, termasuk persimpangan, terminal, gudang, dsb. Prasarana jalan merupakan bagian dari keadaan lingkungan yang lebih luas yang merupakan kelompok dimana kita tinggal.
- Manusia sebagai pemakai jalan, baik para pengemudi maupun pejalan kaki (penumpang ialah bentuk khusus dari muatan). Semua pemakai jalan perlu mengerti penggunaan sistem jalan, karena mereka harus mengetahui bagaimana caranya mengemudi atau berjalan dengan efisien dan aman (selamat).

2.2.4 Anak

Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Bab I Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelajar SMA belum layak mengemudi karena belum memiliki SIM yang dalam segi usia belum berusia 17 tahun. Dengan mempelajari konsep anak, polisi sebagai penegak hukum dapat bijak dalam menentukan tindakan tegas akan pelanggaran yang dilakukan pelajar SMA yang mengakibatkan kecelakaan dan bodoh terhadap hukum.

2.2.5 Pelajar

Pelajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan, “Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan).” Didalam penelitian ini mencakup pada pelajar tingkat SMA.

2.2.6 Pelanggaran Lalu Lintas

Konsep Pelanggaran Lalu lintas sebagaimana dalam “Diktat Fungsi Teknis Lalu Lintas, Akademi Kepolisian” (2013;159) : Pelanggaran Lalu lintas adalah yang menyimpang / bertentangan dari ketentuan perundang – undangan lalu lintas yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu kamseltibcar lalu lintas.

2.2.7 Perundang – undangan

1. UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya Polri menjadi ujung tombaknya, hal ini sesuai dengan pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan Hukum
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Perkap No 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian sektor.

Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 butir 1 dan 2 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian dan kepolisian sektor.

3. Perkap no 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

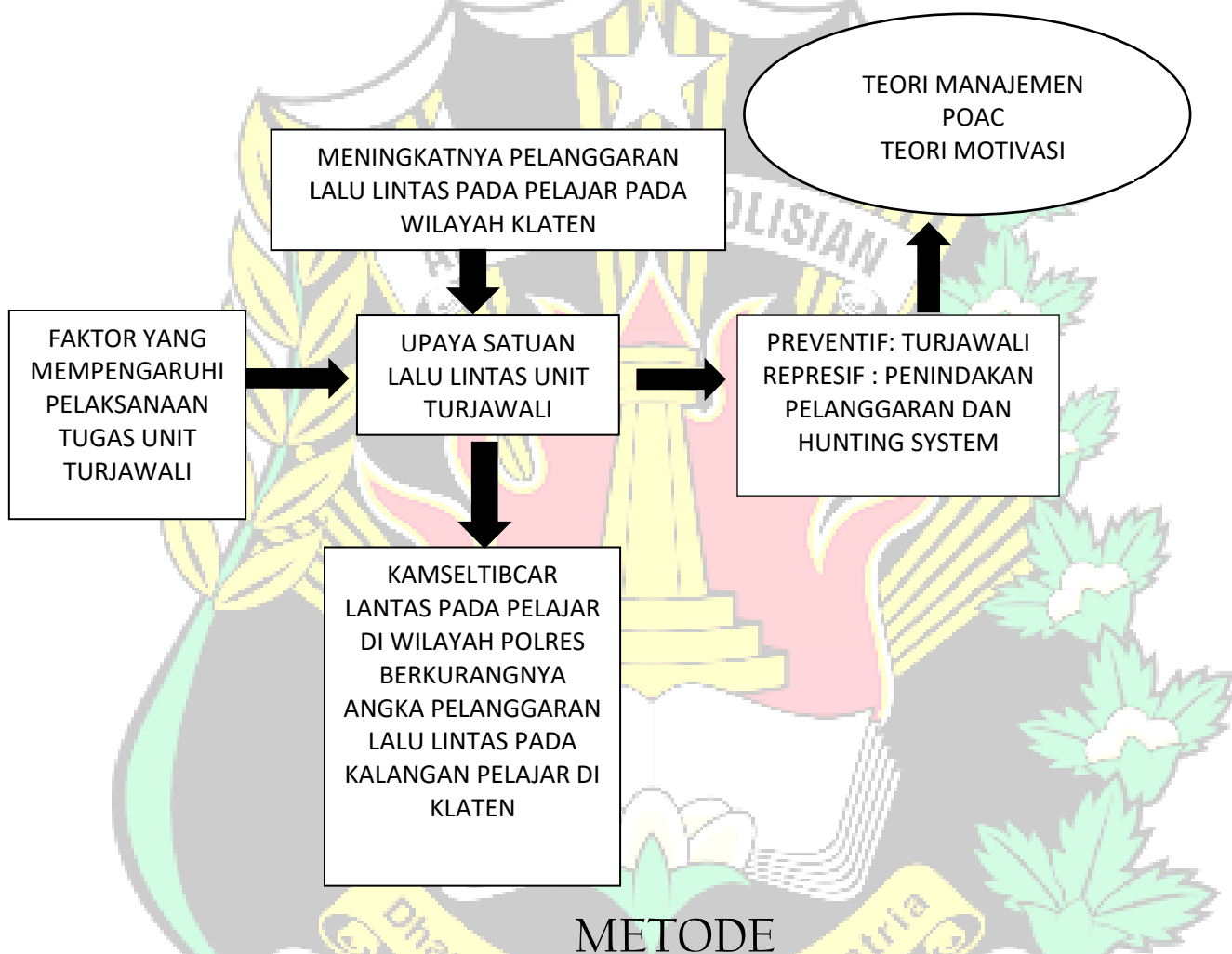
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 2 PP No 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2.3 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir mempermudah peneliti untuk mengungkapkan atau menjelaskan secara umum isi dari penelitian ini. Kerangka berpikir juga membuat pembaca mengerti akan maksud dan tujuan penelitian ini. Dalam sebuah penelitian pentingnya kerangka berpikir

untuk mengontrol dan membatasi fokus penelitian tersebut. Dengan maksud tercapainya tujuan penelitian dan memudahkan pembaca untuk memahami isi yang terkandung dalam penelitian tentang upaya-upaya penindakan pelanggaran unit turjawali Satuan Lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu, baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori, sedangkan terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Penelitian ini dilakukan terlebih dahulu melakukan perencanaan atau rancangan penelitian agar ketika dilakukan penelitian lapangan dapat dilakukan secara sistematis dan data yang diperoleh sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, digunakannya pendekatan ini adalah untuk memahami gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan, yakni menjelaskan mengenai upaya unit turjawali satuan lalu lintas polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar SMA.

Dalam melakukan pengumpulan data yang menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, akan tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penulisan di lapangan. Oleh karenanya analisis data yang dilakukan bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dipadukan dengan teori sebagai alat analisis permasalahan. Jadi pada pendekatan kualitatif, pengumpulan data dan tahap-tahap analisis penulisan, namun teori juga dapat digunakan dalam proses penulisan kualitatif.

3.1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode "*field research*". Dimana metode ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan sebenarnya di lapangan sekarang. Metode penelitian ini juga mengharuskan penulis menganalisa dokumen yang terkait dengan penelitian, dimana menggunakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna suatu keadaan situasi maupun kondisi menurut dimensi peneliti.

Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan mengemukakan gejala-gejala secara lengkap pada obyek yang diteliti. Hal tersebut berguna untuk mengetahui dengan jelas keadaan sebenarnya khususnya yang berhubungan dengan materi penelitian mengenai upaya unit turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*" maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Spradley dalam Sanapiah Faisal (1988) mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu :

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Adapun lima kriteria lain untuk menentukan fokus penelitian, diungkapkan oleh Bungin (2008:64-65), yaitu sebagai berikut.

1. *Interesting*. Fokus masalah selalu masalah yang menarik perhatian orang lain, dengan cara meyakinkan orang lain bahwa masalah yang akan diteliti adalah masalah yang penting, urgen, dan perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan.
 2. *Aktual*. Maksudnya, masalah yang dipilih memiliki fokus masalah yang aktual, *up to date*, kekinian, dan tidak basi ditelan zaman. Sesuatu yang *aktual* adalah sesuatu yang sedang dihadapi oleh masyarakat, sesuatu yang sedang dibicarakan, sesuatu yang sedang dicari jalan keluarnya. Penelitian yang aktual seharusnya akan dapat memberi jalan keluar, solusi, dan masukan-masukan terhadap berbagai persoalan tersebut.
 3. *Monumental*. Masalah yang monumental adalah masalah-masalah yang selalu diingat masyarakat dan bertahan lama. Misalnya, masalah yang berhubungan dengan kekuasaan, sejarah, proses konstruksi moral, sosial, agama, dan sebagainya.
 4. *Spektakuler*. Maksudnya adalah masalah yang menakjubkan, mengagumkan, dahsyat, wah, dan cenderung mengadopsi budaya populer. Masalah-masalah semacam ini akan menarik perhatian banyak kalangan, dikenang sebagai sesuatu yang “magis dan religius”, serta memikat banyak orang.
 5. Fokus pada tema tertentu. Fokus penelitian sebaiknya diarahkan kepada tema-tema tertentu saja agar penelitian tidak melebar ke mana-mana, kita pun akan terbantu karena tidak mengalami kesulitan dalam membahas sebuah penelitian yang fokus.
- Fokus penelitian yang diteliti oleh penulis adalah upaya unit turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2014 : 145) Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan lokasi penelitian yang berada di Satuan Lalu Lintas Polres Klaten, Jl Diponegoro No 27 Klaten Jawa Tengah.

3.4 Sumber Data / Informasi

Sumber data / informasi pada penulisan yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat disebut sebagai nara sumber, partisipan, informan, teman dan sebagainya. Sumber data / informasi yang dipilih peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam dalam penulisan ini adalah para pimpinan dan beberapa personel jajaran Polres Klaten, serta bila dimungkinkan akan diambil pula informasi dari beberapa instansi terkait serta masyarakat yang terlibat langsung dengan obyek penulisan. Beberapa alasan pemilihan sumber-sumber data/informasi tersebut didasarkan pada persyaratan bahwa :

1. Sumber data/informasi adalah pihak-pihak yang dapat memberikan suatu data dan informasi yang bersifat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sumber data/informasi adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan pertimbangan bahwa mereka mempunyai banyak pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang ada kesesuaian dengan obyek penulisan.

3.4.1 Data Primer

Dalam penulisan ini, selain memperoleh data dan informasi data dan informasi yang relevan dengan obyek penulisan, peneliti juga mendapatkan data/informasi tentang situasi sosial dari beberapa sumber data/informasi tersebut tentang bagaimana sumber data/informasi dan aktivitasnya serta bagaimana kedudukannya dalam organisasi. Adapun sumber data/informasi primer dalam penulisan ini, adalah :

1. Kasat Lantas Polres Klaten, untuk memperoleh informasi tentang lalu lintas khususnya kecelakaan lalu lintas pada Polres Klaten dan sebagai penanggung jawab pada bidang lalu lintas di wilayah hukum Polres Klaten.
2. Kanit Laka Polres Klaten, untuk memperoleh data-data kecelakaan yang terjadi di wilayah Klaten serta kegiatan pencegahan karena kecelakaan biasa didasari dengan pelanggaran lalu lintas.
3. Kanit Turjawali Polres Klaten, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten.
4. Kanit Dikyasa Polres Klaten, untuk mengetahui program – program apa saja yang telah dilaksanakan untuk mengurangi kecelakaan pada kalangan pelajar.
5. Sekretaris Dinas Perhubungan, untuk mengetahui karakteristik masyarakat Klaten dalam berlalu lintas dan penyebab pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten.
6. Beberapa anggota Satuan Lalu Lintas Polres Klaten, sebagai pihak yang turun langsung untuk mengupayakan program-program yang ada di Polres Klaten agar pelanggaran pada kalangan pelajar berkurang.
7. Beberapa pelajar di Kabupaten Klaten, sebagai pelanggar lalu lintas maupun sebagai pelajar yang tertib berlalu lintas
8. Guru, sebagai penghubung antara pihak kepolisian dengan pelajar.

3.4.2 Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari dokumen, foto, buku-buku, sumber internet dan laporan yang berkaitan dengan penelitian.

3.4.3 Data Tersier

Sumber data yang diperoleh dari literatur dan kajian pustaka yang berkaitan dengan upaya penindakan pelanggaran satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara menghimpun bahan – bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan, (Muhammad dan Djaali, 2005: 29). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti data mencatatnya. Peneliti juga dapat membawa alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden, wawancara baik yang dilakukan dengan *face to face* maupun yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak

pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

2. Observasi

Marshall (1995) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi tak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi.

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

3. Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan pelengkap hasil penulisan yang didapat dari wawancara sehingga akan lebih kredibel (dapat dipercaya) hasil penulisan tersebut. Telaah dokumen ini merupakan teknik pengambilan data melalui pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penulisan. Pada penulisan ini, peneliti mengambil dokumen yang diperlukan dari instansi terkait yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

Dalam melakukan pengumpulan data diperlukan instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti disesuaikan dengan teknik pengumpulan data.

3.6 Validitas Data

Berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : KEP/157/XII/2016, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian (2016:19),

“Data penelitian harus dicek keakuratan dan keajegan datanya. Validitas adalah untuk mengetahui akurat data yang menggunakan pendekatan kualitatif, validitas data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas, dan triangulasi data. Validitas untuk data kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik. Sedangkan realibilitas untuk mengetahui keajegan data untuk pendekatan kuantitatif melalui analisa statistik.”

Keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*). Teknik yang digunakan untuk melacak *credibility* dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi (*triangulation*).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini. Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang ditempuh adalah :

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.
- b. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan pelaksanaannya dengan praktek.

Dengan demikian, menurut Patton terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:

- a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat dari luar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori yaitu teori manajemen dan teori motivasi yang telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data.

d. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

Teknik membandingkan antara hasil wawancara dengan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen agar dapat dilihat hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : KEP/157/XII/2016, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian (2016:19):

“Teknik analisis data menggambarkan rencana peneliti tentang bagaimana data diolah dan interpretasi dilaksanakan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Penelitian kuantitatif menggunakan teknik statistik dan untuk itu berbagai software telah tersedia untuk membantu peneliti mengolah data. Sementara itu, analisis data dalam penelitian kualitatif juga harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Proses analisis data menghasilkan kesimpulan-kesimpulan temuan penelitian.”

Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Aktivitas analisis data yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti. Peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pada pemustakaan, khususnya yang berhubungan dengan peraturan dan perundang – undangan

b. Sajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Dari hasil penelitian penulis pada Satuan Lalu Lintas Polres Klaten penulis menemukan langsung berbagai upaya satuan lalu lintas polres Klaten untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Klaten serta gambaran umum Polres Klaten.

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

a. Keadaan Geografi Kabupaten Klaten

1. Letak Daerah

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Surakarta yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan pariwisata. Kabupaten Klaten terletak antara 1100.26'.14" Bujur Timur - 1100.47'.51" Bujur Timur dan 70.32'.19" Lintang Selatan - 70.48'.33" Lintang Selatan. Batas daerah wilayah Kabupaten Klaten meliputi :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Tabel 4.1

Luas daerah (Ha) per Kecamatan dan batas-batasnya

NO	KECAMATAN	LUAS TANAH	BATAS WILAYAH		
		JML	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	2	3	4	5	6
1.	KLATEN TENGAH	890	KALIKOTES	KLATEN SELATAN	KEBONARUM
2.	KLATEN UTARA	1.038	C E P E R	KLATEN TENGAH	NGAWEN
3.	KLATEN SELATAN	1.444	KLATEN TENGAH	W E D I	KEBONARUM
4.	NGAWEN	1.697	KARANGAN OM	KLATEN UTARA	KARANGNONG KO
5.	KALIKOTES	1.300	BAYAT	WEDI	KLATEN SELATAN
6.	KEBONARUM	966	KLATEN SELATAN	JOGONALAN	KARANGNONG KO
7.	W E D I	2.438	B A Y A T	NGAWEN (DIY)	GANTIWARNO
8.	JOGONALAN	2.670	KLATEN SELATAN	KEBONARUM	PRAMBANAN

9.	GANTIWARN O	2.564	W E D I	NGAWEN (DIY)	PRAMBANAN
10.	PRAMBANAN	2.443	JOGONALAN	GANTIWARNO	SLEMAN (DIY)
11.	MANISRENGG O	2.696	KARANGNO NGKO	PRAMBANAN	SLEMAN (DIY)
12.	KEMALANG	5166	KARANGNO NGKO	MANIBRENGG O	SLEMAN (DIY)
01	02	03	04	05	06
13.	KARANGNON GKO	2.674	NGAWEN	KEBONARUM	MANISRENGGO
14.	JATINOM	3.553	KARANGAN OM	N G A W E N	KARANGNONG KO
15.	KARANGANO M	2.406	POLANHARJ O	N G A W E N	JATINOM
1	2	3	4	5	6
16.	POLANHARJO	2.384	DELANGGU	CEPER	KARANGANOM
17.	TULUNG	3.200	POLANHARJ O	JATINOM	BOYOLALI
18.	DELANGGU	1.878	WONOSARI	JUWIRING	POLANHARJO
19.	WONOSARI	3.114	SUKOHARJO	JUWIRING	DELANGGU
20.	JUWIRING	2.979	SUKOHARJO	KARANGDOWO	DELANGGU
21.	C E P E R	2.445	PEDAN	TRUCUK	KARANGANOM
22.	P E D A N	1.917	KARANGDO WO	C A W A S	CEPER
23.	KARANGDOW O	2.923	SUKOHARJO	C A W A S	P E D A N
24.	TRUCUK	3.381	CAWAS	B A Y A T	KALIKOTES
25.	C A W A S	3.447	SUKOHARJO	GUNUNG KIDUL	B A Y A T
26.	B A Y A T	3.943	C A W A S	GUNUNG KIDUL	W E D I
J U M L A H		65.556			

Sumber: Intel dasar Polres Klaten

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Klaten



Sumber: Intel Dasar Polres Klaten

b. Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten sebanyak 1.295.905 jiwa, terdiri dari laki-laki 646.248 jiwa, perempuan 649.657 jiwa, dengan penyebaran :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	JUMLAH TOTAL		JUMLAH	KET
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN		
1.	PRAMBANAN	25.384	25.786	51.170	
2.	GANTIWARNO	19.154	19.133	38.287	
3.	W E D I	26.257	26.559	52.816	
4.	B A Y A T	32.320	31.881	64.201	
5.	C A W A S	30.275	30.755	61.030	
6.	TRUCUK	40.009	39.536	79.545	
7.	KEBONARUM	10.281	10.641	20.922	
8.	JOGONALAN	29.638	29.403	59.041	
9.	MANISRENGGO	21.475	22.038	43.513	
10.	KARANGNONGKO	18.640	19.008	37.678	
11.	C E P E R	32.804	32.523	65.327	

12.	P E D A N	24.207	24.156	48.363	
13.	KARANGDOWO	22.736	22.984	45.720	
14.	JUWIRING	30.017	30.283	60.300	
15.	WONOSARI	32.092	32.395	64.487	
16.	DELANGGU	21.739	21.771	43.510	
17.	POLANHARJO	21.128	21.542	42.670	
18.	KARANGANOM	23.517	23.548	47.065	
19.	TULUNG	27.151	27.312	54.463	
20.	JATINOM	36.027	30.022	60.049	
21.	KEMALANG	18.870	18.952	37.822	
22.	NG A W E N	23.176	23.000	46.176	
23.	KALIKOTES	18.842	18.868	37.710	
24.	KLATEN UTARA	23.726	23.792	47.518	
25.	KLATEN TENGAH	20.535	21.283	41.818	
26.	KLATEN SELATAN	22.218	22.486	44.704	
	J U M L A H	646.248	649.657	1.295.905	

Sumber : Intel dasar Polres Klaten

2. Mata pencaharian penduduk:

1. Pertanian
2. Buruh Tani
3. Pedagang
4. Karyawan
5. Perindustrian
6. Buruh bangunan
7. TNI / Polri
8. PNS

Tabel 4.3
Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Klaten

No	TINGKAT PENDIDIKAN UMUM	JUMLAH
1	TK	891 buah
2	SD	819 buah
3	SMP	143 buah
4	SMA	32 buah
5	SMK	57 buah
6	MA	6 buah

Sumber : Intel Dasar Polres Klaten

4.1.2 Gambaran Umum Polres Klaten

a. Struktur

Pengorganisasian yang tepat dalam penyusunan kelembagaan aparaturnya pemerintah termasuk pengorganisasian Kepolisian perlu didasarkan pada asas – asas tugas pokok aparaturnya pemerintah sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Hal ini menunjukkan Polres Klaten merupakan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Tengah di bawah Kapolda Jawa Tengah.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas – tugas lain dalam wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Adapun susunan organisasi Polres Klaten dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Polres Klaten memiliki 24 Polsek yang terdiri dari :

1. Polsek Klaten Kota
2. Polsek Ketandan
3. Polsek Kebonarum
4. Polsek Wedi
5. Polsek Jogonalan
6. Polsek Gantiwarno
7. Polsek Prambanan
8. Polsek Manisrenggo
9. Polsek Kemalang
10. Polsek Karangnongko
11. Polsek Jatinom
12. Polsek Karangnom
13. Polsek Tulung
14. Polsek Polanharjo
15. Polsek Delanggu
16. Polsek Wonosari
17. Polsek Juwiring
18. Polsek Ceper
19. Polsek Pedan
20. Polsek Karangdowo
21. Polsek Trucuk
22. Polsek Cawas
23. Polsek Bayat
24. Polsek Kalikotes

b. Visi dan Misi Polres Klaten

1. Visi

Terwujudnya Polisi Polres Klaten yang profesional, bermoral dan modern dengan cara meningkatkan pelayanan prima yang berlandaskan Prosedural, Disiplin, Latihan dan Taqwa untuk menciptakan polisi yang dicintai masyarakat.

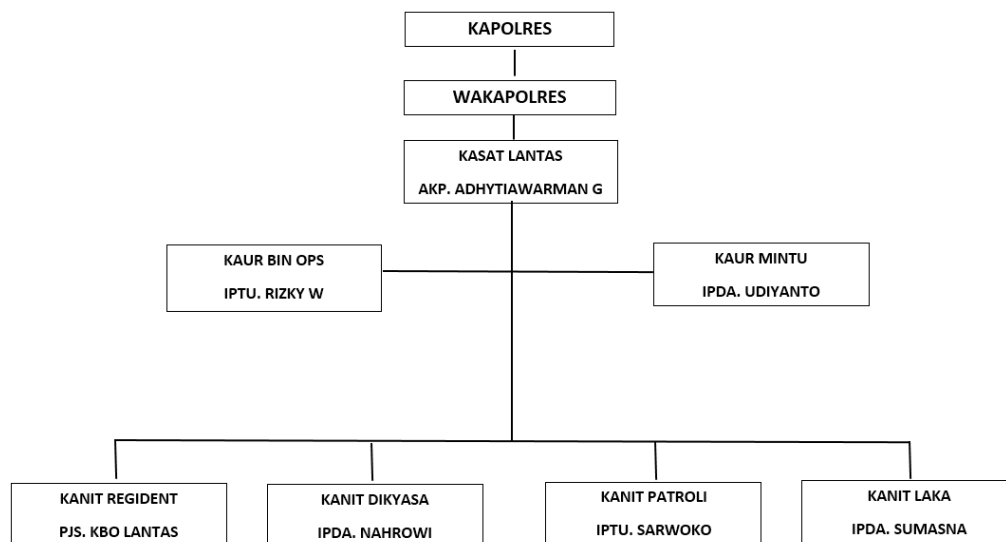
2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responsif dan tidak diskriminatif dalam mewujudkan masyarakat yang tata tentrem karta raharja.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah, serta memfasilitasi kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas polisi dalam mewujudkan program perpolisian masyarakat.
- c. Memelihara Kamtibmas lantas.
- d. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*)
- e. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.
- f. Meningkatkan kemampuan anggota dengan mengikut sertakan pendidikan secara formal maupun non formal guna menjadikan polisi yang Profesional dan modern.

4.1.3 Satuan Lalu Lintas Polres Klaten

Sebagaimana peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Sat Lantas Polres Klaten memiliki tugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dibawah ini adalah susunan organisasi satuan Lalu lintas Polres Klaten.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Klaten



Sumber :

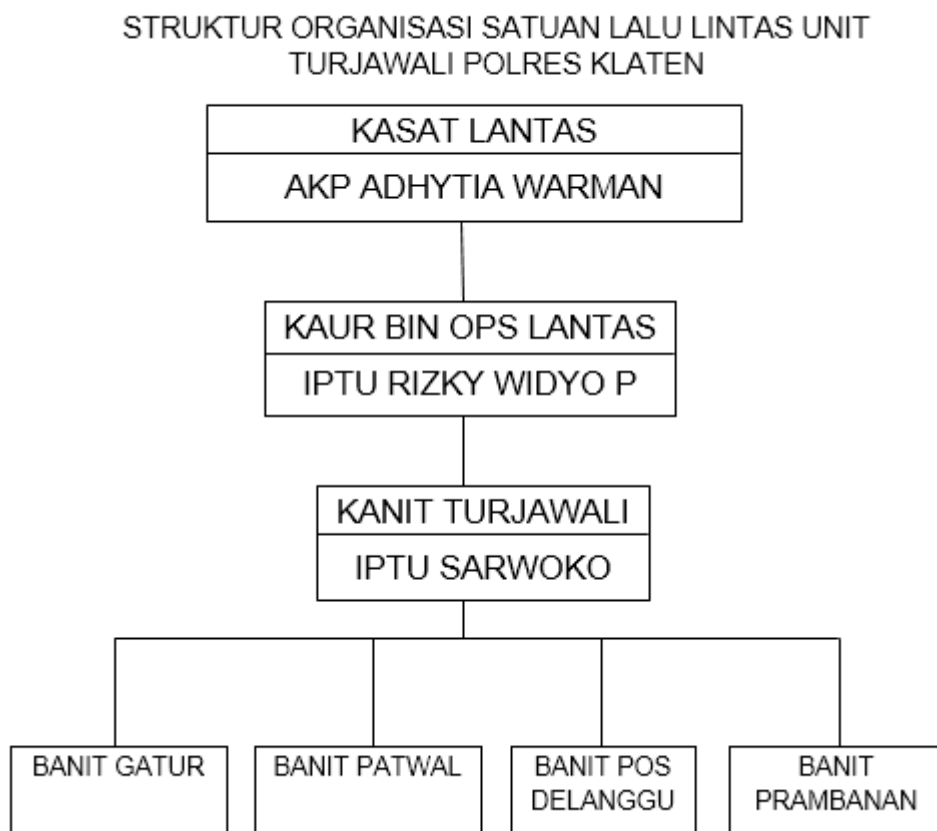
minops satuan lalu lintas Polres Klaten

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satlantas Polres Klaten menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelaksanaan fungsi kepolisian Bidang Lalu Lintas dalam meliputi wilayah :
 - a. Penegakan hukum lalu lintas (*police traffic law Enforcement*)
 - b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*police traffic education*)
 - c. Rekayasa lalu lintas (*police traffic engineering*)
 - d. Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
 2. Membantu penyelenggaraan dan melaksanakan operasi khusus sesuai perintah dan petunjuk pimpinan.
 3. Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
 4. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan operasional dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk lapangan tentang pelaksanaan fungsi lantas kepada seluruh anggota Sat Lantas.
 5. Menyusun rencana dan program kegiatan Sat Lantas Polres Klaten berdasarkan program kerja Polres Klaten maupun Dit Lantas Polda Jateng.
 6. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping yang berkaitan dengan tugas lalu lintas
- Sat Lantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas disingkat Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Waka Polres.

4.1.4 Unit Turjawali

Gambar 4.3



Sumber : minops satuan lalu lintas Polres Klaten

Dari gambar struktur organisasi satuan lalu lintas unit turjawali diatas, dapat dilihat bahwa kanit turjawali menangani empat banit yang memiliki tugas masing – masing. Dari empat banit tersebut mengepalai anggota – anggota dibawahnya, berikut penulis sajikan data personel unit turjawali yang ada pada Polres Klaten.

Tabel 4.4
Personel unit Turjawali Polres Klaten

NO	NAMA	PANGKAT	N R P	JABATAN
1	2	3	4	5
1	ADHYTIAWARMAN GAUTAMA PUTRA, SIK, MH.	AKP	85092005	KASAT LANTAS
2	RIZKY WIDYO PRATOMO, SIK	IPTU	89080711	KAUR BIN OPS
UNIT GATUR				
3	TUGIMAN	AIPTU	74060633	BANIT GATUR
4	BUDI SANTOSO	BRIPKA	81100448	ANGGOTA GATUR
5	ADI NUGROHO	BRIGADI	86090729	SDA

		R		
6	MUHLISIN	BRIPKA	83100906	SDA
7	ASIH MULYONO	BRIPKA	83060478	SDA
8	GATOT SETIAWAN	BRIPKA	78090155	SDA
9	FERIANTO NUGROHO	BRIGADI R	88020830	SDA
10	MUCH AKHID PURDANA	BRIGADI R	89090330	SDA
11	YUDY FIRMANSYAH	BRIGADI R	87120522	SDA
UNIT PATWAL / BM				
12	SARWOKO	IPTU	76040320	KANIT TURJAWALI
13	HENDRO SUPRIYATNO	AIPTU	75090818	BANIT PATWAL
14	DANANG NOVIANTO	BRIGADI R	84110519	SDA
15	FITRI ADI KURNIAWAN	BRIGADI R	85061286	SDA
16	APIN ARYADI	AIPDA	78030862	PATWAL RU II
17	EKO SETYO HARYONO	BRIPKA	80090838	SDA
18	ADI TRI ATMOJO	BRIPKA	82040786	SDA
19	YURQONI M, SH	BRIGADI R	85111891	SDA
20	HENDROYONO	AIPDA	80020172	PATWAL RU III
21	HERDI SULISTYO WIBOWO	BRIPKA	83040034	SDA
22	ARINTO, SH	BRIPKA	82110710	SDA
23	JOKO TRI WAHYUDI, SH	BRIPKA	80031110	SDA
24	AGUS WIDODO	BRIPKA	84030811	SDA
25	SAM PUTRA PRADANA	BRIPDA	94030687	SDA
26	ARY HARYANTO	BRIPDA	93010601	SDA
UNIT BESAR DELANGGU				
27	PURWADI	AIPTU	76040592	BANIT POS DLG
28	EVA YUNANTO ELDIA	BRIPKA	83061268	ANGGOTA
29	AGUNG RISTONO	BRIGADI R	85051906	SDA
30	INDARMAWAN	BRIGADI R	85110657	SDA
31	WASIS	BRIPKA	69100286	SDA
32	DANANG SETYABUDI	BRIPKA	82120633	SDA
33	RUDY KRISTIYANTO	BRIGADI R	87051532	SDA
34	ANANG BANGUN G, SH	BRIGADI R	87030645	SDA
35	DWI PARYANTO	BRIGADI R	85060949	SDA
36	SUYAMTO	BRIPKA	82120089	SDA
37	TAUFIK. FL	BRIPKA	83070390	SDA

1	2	3	4	5
38	HERU SURYANTO	BRIPKA	84100197	SDA
39	TRI WAHYUDI, S Psi	BRIGADI R	85101865	SDA
40	HERU BUDI. S	BRIGADI R	88040746	SDA
41	ARIK SETIAWAN	BRIPKA	84110601	SDA
42	IRUL ROHMANTO	BRIGADI R	84111326	SDA
POS BESAR PRAMBANAN				
43	SUMARDIYANTO	AIPTU	75110332	BANIT PRAMBANAN
44	BAMBANG SUWARTO	AIPDA	76110411	ANGGOTA
45	TEGUH PURNOMO	BRIPKA	85010098	SDA
46	SULTON SAFIDI	BRIGADI R	85031688	SDA
47	WENDY KURNIAWAN	BRIGADI R	87061283	SDA
48	TOPO LILIS ARWANTO	BRIGADI R	76090715	SDA
49	ABAS PANSURI	BRIGADI R	86010399	SDA
50	EKO PRASETYO	BRIGADI R	88020901	SDA
51	ROCHMAD TRI HARYONO	BRIPKA	85060964	SDA
52	SUPRIYANTO	BRIGADI R	87040369	SDA
53	TEGUH PRIYADI	BRIPKA	85110549	SDA
54	SURAJI	BRIPKA	82100340	SDA
55	MOCH ABDUL ROKIM	BRIGADI R	85061943	SDA

Sumber : minops satuan lalu lintas Polres Klaten

Kegiatan dalam turjawali lalu lintas lebih mengedepankan upaya – upaya preventif dan pre – emtif Polantas dalam menciptakan kamseltibcar lantas. Turjawali dapat digunakan Polantas sebagai alat dalam rangka pencitraan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

1. Pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari Polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
2. Penjagaan lalu lintas merupakan kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat – tempat tertentu bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan. Pengawasan lalu lintas adalah suatu kegiatan penghantaran orang, barang/benda dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat protokoler dan non protokoler.
3. Patroli Lalu Lintas merupakan kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (*deterrence effect*) bagi pemakai jalan, menemukan/menindak pelanggar lalu lintas serta memberikan perlindungan berupa pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas didasarkan pada intensitas kerawanan lalu lintas antara lain :
 - a. Dalam Kota

- a) Pada ruas – ruas jalan yang ada bangunan fasilitas umum seperti :
Pasar, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, dll
 - b) Persimpangan – persimpangan yang volume lalu lintasnya padat baik yang diatur APIL maupun tidak.
 - c) Ruas – ruas yang memiliki kerawanan terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti :
angkutan kota / angkutan desa / bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya atau sedang mencari/menunggu penumpang.
 - d) Ruas – ruas jalan yang rawan terhadap kecelakaan lalu lintas (*black spot*)
- b. Luar Kota
- a) Ruas – ruas jalan tertentu yang karakteristiknya *bottle neck* (leher botol) seperti :
lokasi jembatan, pengalihan jalan, dll
 - b) Ruas – ruas jalan yang banyak menimbulkan kerumunan massa seperti :
terminal bayangan, pasar tumpah, pangkalan truk, dll.
 - c) Ruas – ruas jalan yang rawan terhadap kecelakaan lalu lintas (*black spot*)

Untuk pola pelaksanaan patroli wilayah hukum Polres Klaten menggunakan base Pos Lintas, dengan beberapa titik pos antara lain, yaitu:

1. Pos simpang 3 Pakis.
2. Pos simpang 4 Delanggu
3. Pos simpang 4 Karang
4. Pos simpang 3 Penggung
5. Pos simpang 4 RSI Klaten
6. Pos simpang 3 Jonggrangan
7. Pos simpang 4 Plaza
8. Pos simpang 3 Merapi
9. Pos simpang 3 Tegalyoso
10. Pos simpang 4 pasar Srago
11. Pos simpang 3 Prambanan

Selain kegiatan Preventif dan Pre – emtif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas, ada juga kegiatan represif yaitu kegiatan penindakan pelanggaran yang dijelaskan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur. Mekanisme penindakan sesuai SOP dari Polres Klaten yaitu:

1. Sat Lintas melalui anggota yang bertugas di lapangan sebelum memulai penindakan pelanggaran diharuskan memasang papan petunjuk adanya pemeriksaan di lokasi dilaksanakan pemeriksaan.
2. Sat Lintas melalui anggota yang bertugas dilapangan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran (dakgar) lintas dipersiapkan administrasi pendukung antara lain blangko tilang, surat perintah tugas (springas), dan label barang bukti.
3. Sat Lintas dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran (dakgar) dipimpin oleh perwira.
4. Sat Lintas melalui anggota yang bertugas di lapangan bertindak tegas dengan menilang dan menyita kendaraan yang tidak laik jalan, sampai pada putusan pengadilan.
5. Target sesuai dengan evaluasi pelanggaran yang dilakukan

Ada juga tata cara penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Standar Operasional Prosedur yaitu:

1. Setiap pelanggaran di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat menitipkan denda kepada bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat(3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran
6. Dalam sistem E- Tilang nantinya polisi dalam menilang pelanggar selain menggunakan blangko atau surat tilang juga, pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian.
7. Untuk tilang yang saat ini kita kenal dengan slip merah yang pelanggarnya ingin mengikuti sidang, prosesnya juga sama. Aplikasi e-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu.

Kemudian dijelaskan Pendindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan pola 12 prioritas penindakan pelanggaran lalu lintas :

1. Menindak pelanggar zebra cross
2. Menindak pelanggaran kendaraan Roda 4 / Roda 2 yang menyalahi peruntukan muatan / melebihi dimensi muatan
3. Penindakan pelanggaran kendaraan yang melawan arus
4. Penindakan pelanggaran marka jalan rambu lalu lintas dan apil
5. Penindakan pelanggaran terhadap angkutan umum yang penumpang bergelantungan
6. Penindakan pelanggaran terhadap kendaraan Roda 2 yang berboncengan lebih dari 1
7. Penindakan pelanggaran terhadap pengemudi kendaraan roda 2 tidak memakai helm
8. Penindakan terhadap pengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan raya
9. Penindakan terhadap pengemudi kendaraan yang mengemudikan tidak wajar
10. Penindakan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan
11. Penindakan terhadap pelanggaran mobil barang untuk mengangkut orang
12. Penindakan terhadap pelanggaran pengendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM

4.1.5 Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten

Terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Klaten tahun 2014 – 2016 ditunjukkan melalui data yang ada pada satuan lalu lintas sebagai berikut :

Tabel 4.5

Jumlah Pelanggaran tilang Periode 2014 s/d 2016

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN TILANG	DENDA (Rp)
1.	2014	26.901	1.103.835.000,-
2.	2015	26.089	1.160.404.000,-
3.	2016	21.207	1.035.533.000,-

Sumber: Minops tilang Polres Klaten

Dilihat dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten menurun. Berikut disajikan jumlah masyarakat yang menerima teguran dan yang melanggar dikenakan sangsi tilang oleh pihak kesatuan lalu lintas Polres Klaten :

Tabel 4.6
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Pelanggar / Teguran Tahun 2016

NO	BULAN	TILANG	JUMLAH GAR	
			TEGURAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	JANUARI	2094	4770	6864
2	FEBRUARI	1988	4418	6406
3	MARET	1634	4490	6124
4	APRIL	1652	4236	5888
5	MEI	2505	5247	7752
1	2	3	4	5
6	JUNI	1240	4093	5333
7	JULI	1085	4399	5484
8	AGUSTUS	1989	4668	6657
9	SEPTEMBER	1920	4677	6597
10	OKTOBER	1703	4599	6302
11	NOPEMBER	3397	2921	6318
12	DESEMBER	2695	4858	7553
JUMLAH		23902	53376	77278

Sumber: Minops Tilang Polres Klaten

Terlihat pada tabel diatas bahwa pelanggaran yang ditindak lanjuti oleh pihak satuan lalu lintas Polres Klaten lebih sedikit jumlahnya daripada yang diberikan teguran atau himbauan oleh satuan lalu lintas Polres Klaten.

Tabel 4.7
Jumlah pelanggaran berdasarkan pendidikan pelanggar pada bulan November 2016

No	PENDIDIKAN	MINGGU 3	MINGGU 4	KET
1	SD	0	0	TETAP
2	SMP	67	7	TURUN
3	SMA	894	1193	NAIK
4	PT	26	78	NAIK
5	Lainnya	0	0	TETAP
Jumlah		987	1278	NAIK

Sumber : minops tilang Polres Klaten

Menurut tabel 4.7 dari pendidikan pelanggar, untuk yang mengalami kenaikan hanya pada pelanggar SMA dan perguruan tinggi, untuk kenaikan yang sangat signifikan dialami oleh pelanggar yang berpendidikan SMA, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan permasalahan pada unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Klaten. Walaupun angka

pelanggaran menurun pada tiga tahun terakhir, namun data dari minops Polres Klaten sendiri untuk pelanggaran pada pelajar SMA masih konsisten terjadi kenaikan pada setiap minggunya,

4.1.6 Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh Pelajar SMA di Kabupaten Klaten

Pelajar SMA dari segi umur tergolong usia anak dan belum layak mengemudikan. Dalam dokumen Satuan Lalu Lintas Polres Klaten 2016, ditunjukkan:

Tabel 4.8
Data pelanggaran yang sering dilakukan pelajar SMA

NO	SATWIL	GAR ZEBRA CROSS PASAL 287 AYAT (1) jo PASAL 106 AYAT (4) HURUF a DAN PASAL 106 AYAT 4 HURUF b	GAR MELAWAN ARUS PASAL 287 AYAT (1) jo PASAL 106 AYAT (4) HURUF a DAN PASAL 106 AYAT 4 HURUF b	GAR (PASAL 287 AYAT (1) , JO PASAL 106 (AYAT (4) HURUF A KMA B DAN C))			GAR BERBONGCENGAN LEBIH DARI 1 PASAL 292 jo PASAL 106 AYAT (9)	GAR TDK MEMAKAI HELM PASAL 291 AYAT 1 jo PASAL 106 AYAT (8)	PENGENDARA DI BAWAH UMUR (tidak memiliki SIM (Pasal 281 Jo Pasal 77 (1))		JUMLAH TILANG
				RAMBU	MARKA	APTEL			RD 2	RD 4	
1	2	4	7	8	9	10	12	13	18	19	20
1	JANUARI	59	113	170	151	78	67	391	110	4	2094
2	FEBRUARI	42	321	161	115	54	53	426	100	6	1988
3	MARET	43	343	125	88	42	43	291	129	6	1634
4	APRIL	36	80	66	216	36	29	250	113	4	1652
5	MEI	47	36	59	376	156	19	174	334	3	2505
6	JUNI	15	4	42	163	36	7	133	145	0	1240
7	JULI	39	50	121	119	64	10	148	182	2	1085
8	AGUSTUS	38	62	70	277	120	18	226	206	0	1989
9	SEPTEMBER	18	76	57	257	119	20	234	192	0	1920
10	OKTOBER	21	56	45	223	97	18	192	160	0	1703
11	NOPEMBER	31	397	43	774	416	18	860	151	0	3397
12	DESEMBER	43	273	72	398	214	21	330	172	0	2695
JUMLAH		432	1811	1031	3157	1432	323	3655	1994	25	23902

Sumber: Minops tilang Polres Klaten

Berdasarkan tabel 4.8 di atas peneliti menyimpulkan bahwa di Kabupaten Klaten berkaitan dengan permasalahan lalu lintas pelajar SMA dominan terlibat didalamnya. Pelajar SMA di Klaten rata – rata bersekolah belum memiliki SIM. Hal tersebut mendorong peneliti melalui metode penelitian *field research* mencari temuan yang melatarbelakangi temuan fenomena di atas untuk di analisis. Adapun hasil temuan peneliti sebagai berikut.

Pertama adalah faktor jarak berkaitan tingginya keinginan orang tua dan minat anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas membuat masyarakat (orang tua) yang berada di desa maupun di kecamatan berupaya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka tidak mepedulikan berapa jarak yang harus ditempuh untuk pergi ke sekolah meskipun ada juga yang memilih kos dari pada harus perjalanan pulang pergi setiap hari. Untuk mempersingkat waktu tempuh pergi ke sekolah supaya tidak

terlambat pada umumnya para pelajar khususnya tingkat SMA memilih menggunakan motor dibandingkan menggunakan sepeda ontel padahal menurut hukum pelajar SMA yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan menggunakan motor. Dari hasil wawancara secara acak pada tanggal 8 Maret 2017 kepada Bapak Eko, dalam wawancaranya mengatakan:

Sebenarnya saya setiap hari dihantui perasaan kawatir karena anak saya berangkat sekolah menggunakan sepeda motor roda dua padahal belum memiliki SIM dan tidak ada pilihan lain saya terpaksa mengizinkan anak saya memakai sepeda motor ke sekolah karena jarak antara rumah ke sekolah tidaklah dekat. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2017)

Wawancara tersebut di dukung dengan studi dokumen Intel Dasar Polres Klaten 2017 yang menjelaskan bahwa jarak dari kecamatan ke kecamatan jauh. Hal tersebut membuat pelajar SMA yang tinggal jauh dari Klaten tengah memilih menggunakan motor ke sekolah.

Kedua adalah faktor transportasi dari dokumen Intel Dasar Polres Klaten 2017 dijelaskan bahwa sektor transportasi di Klaten terdapat suatu kendala karena angkutan umum di Klaten jumlahnya sangat sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Klaten. Karena Klaten merupakan jalan penghubung antara Yogyakarta menuju Solo maka rutinitas masyarakat Klaten kebanyakan berada di luar kota, sehingga angkutan umum yang beroperasi hanya sedikit. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Sudiyarsono selaku sekretaris dinas perhubungan Kabupaten Klaten pada saat wawancara pada tanggal 7 Maret 2017 bahwa :

Pelayanan angkutan umum di Klaten kurang karena investasi jasa angkutan umum dinilai tidak menarik, pelayanan angkutan umum juga dinilai tidak ideal. Angkutan umum harusnya berani bersaing dengan banyaknya kendaraan pribadi dan berani memberikan fasilitas yang layak seperti adanya AC pada angkutan umum. (Wawancara pada tanggal 7 Maret 2017)

Wawancara tersebut didukung dengan data angkutan umum yang berasal dari dinas perhubungan.

Tabel 4.9
Jumlah Sarana Angkutan Umum Di Kabupaten Klaten
Tahun 2010-2015

Tahun	Bis Besar	Bis Sedang	Bis Kecil
2015	110	196	80
2014	100	125	119
2013	30	60	186

Sumber : Dishub Kabupaten Klaten

Berdasarkan tabel diatas, pemerintah seharusnya berani mengambil resiko menyediakan perbaikan sistem angkutan umum seperti pada Kabupaten Solo dan Kota Yogyakarta yang sudah mengadakan Bus Trans untuk kepentingan masyarakat. Walaupun jumlah angkutan umum setiap tahun meningkat, namun hal tersebut belum memfasilitasi sepenuhnya masyarakat Klaten untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Sedikitnya jumlah angkutan umum yang berada di Kabupaten Klaten menyebabkan pelajar SMA lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi menuju ke sekolah.

Disini angkutan umum ada becak dan ojek yang bisa melewati sekolah, tapi untuk biaya ojek lebih mahal daripada harus membeli bensin untuk kendaraan sendiri, saya juga harus mengantarkan adik saya ke sekolah, karena orang tua sibuk bekerja. Jadi saya lebih memilih menggunakan sepeda motor roda dua walaupun saya belum memiliki SIM. (wawancara pada tanggal 6 Maret 2017)

Wawancara diatas dilakukan pada saat pelaksanaan kunjungan ke SMA Kanisius Klaten, wawancara tersebut diperoleh dari siswi SMA bernama Adelia Rosita. Dari wawancara diatas juga menerangkan bahwa faktor ekonomi yang membuat pelajar lebih memilih untuk menggunakan sepeda motor roda dua sendiri ke sekolah daripada harus menggunakan kendaraan umum, ojek, ataupun becak.

Ketiga adalah kegiatan lain diluar jam sekolah. Antara lain kegiatan ekstra kurikuler maupun bimbingan belajar yang hanya berada di Klaten Tengah. Berdasarkan dari hasil pengamatan pada tanggal 8 Maret 2017 di depan Lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation saat jadwal bimbingan belajar peneliti menemukan banyak sepeda motor yang berada di parkir bimbingan belajar tersebut. Banyak juga ditemukan keluar masuk SMA N 1 Klaten untuk melaksanakan ekstra kurikuler seperti : Basket, volley, teater, dan kesenian lainnya. Dengan adanya temuan tersebut peneliti menyimpulkan sebagian besar pelajar SMA menggunakan kendaraan bermotor untuk melakukan aktivitas di luar jam sekolah.

Dari hasil penelitian, peneliti menjelaskan bahwa kegiatan pelajar SMA setiap hari memang padat karena adanya kegiatan diluar jam sekolah sehingga harus bolak-balik ke sekolah. Hal tersebut merupakan penyebab pelajar SMA menggunakan sepeda motor ke sekolah tanpa memiliki SIM.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan siswa SMA sebagian besar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun kerugian materiil. Pelanggaran lalu lintas banyak ditemukan antara lain : menggunakan motor tanpa memiliki SIM, knalpot tidak standar, motor tidak dilengkapi dengan kaca spion, tidak menggunakan helm, berboncengan tiga, dan berkendara secara ugal – ugalan. Tindakan tersebut sangat mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan / menyimpang dari ketentuan perundang – undangan lalu lintas yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu kamseltibcarlantas.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pelajar SMA disebabkan karena pada usia – usia tersebut secara psikologi mereka sedang dalam pencarian jati diri dan ingin mencoba sesuatu yang baru walaupun hal tersebut bersifat menyimpang bahkan mengarah ke kejahatan. Semakin dilarang pada umumnya pelajar semakin memberontak dan mengabaikan larangan yang ada. Hal ini sesuai dengan konsep *Juvenile Delinquency* yang menyatakan bahwa :

Perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebut sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.

Dalam kasus ini para siswa SMA yang melakukan pelanggaran awalnya dipicu karena pencarian jati diri. Mereka merasa jika berbuat hal tersebut akan terlihat gagah. Selain faktor psikologis, terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa SMA seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas.

Seperti yang tercantum dalam teori *asosiasi diferensial*, menyatakan bahwa : anak dan para remaja menjadi *delinkuen* disebabkan oleh partisipasinya ditengah – tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu menjadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Dalam kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA pada dasarnya mereka melakukan hal tersebut untuk memudahkan kehidupannya,

memudahkan aktifitasnya. Seperti yang terdapat dalam faktor – faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Menurut para pelajar ini, cara mudah untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi adalah dengan membawa kendaraan roda dua pribadi ke sekolah maupun melakukan aktivitas diluar jam sekolah, sehingga masalah mereka dapat teratasi.

4.2 Upaya Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar SMA di Kabupaten Klaten

Pelanggaran lalu lintas pada Polres Klaten masih dapat ditangani oleh satuan lalu lintas Polres Klaten, dalam hal ini terbukti dengan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar di Kabupaten Klaten. Upaya – upaya yang dilaksanakan unit Turjawali Polres Klaten, penulis analisa menggunakan teori manajemen *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan) oleh George Terry.

4.2.1 Perencanaan upaya unit turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA

Dalam tahap perencanaan, Kanit Turjawali membuat rencana kegiatan harian dan mingguan. Kanit Turjawali menentukan cara bertindak, membagi – bagi setiap pos, ada pos tetap dan ada pos sementara. Pos tetap adalah dimana anggota satuan lalu lintas selalu berjaga pada pos tersebut untuk pos sementara biasa ada pada saat adanya hari besar keagamaan seperti pada saat natal dan idul fitri. Menentukan lokasi rawan, jenis pelayanan yang diperlukan, waktu rawan, bentuk kerawanan dan penyebabnya, menentukan apakah ada potensi masyarakat yang dapat dilibatkan dalam hal ini pelajar SMA, melibatkan PKS.

Mengkaji kemampuan personil dalam bekerja, Polres Klaten mempunyai 70 (tujuh puluh) anggota Turjawali yang dapat melaksanakan tugasnya. Pada anggota satuan lalu lintas polres Klaten belum semua melaksanakan pendidikan kejuruan Lalu Lintas, dalam hasil wawancara dengan kasat lantas Klaten AKP Adhytiawarman Gautama Putra SH, SIK mengatakan bahwa :

Belum semua anggota sudah melaksanakan pendidikan kejuruan lalu lintas, tapi untuk anggota satuan lalu lintas setiap hari sabtu pagi setelah apel diadakan pertemuan di ruang K3i, untuk belajar mengenai lalu lintas dan saling bertukar informasi mengenai pengalaman kerja di satuan lalu lintas. (Wawancara pada tanggal 3 Maret 2017)

Dari pernyataan tersebut merupakan fakta bahwa kasat lantas Polres Klaten benar – benar menyiapkan anggota satuan lalu lintas yang akan terjun ke lapangan untuk menertibkan masyarakat terutama pelajar SMA. Sebelum diterjunkan kelapangan harus menentukan siapa petugasnya pada tiap pos dan kesatuannya, kemudian menyusun jadwal penugasan.

Tentukan cara bertindak yang akan dilakukan antara lain memeriksa kendaraan bermotor, menentukan siapa yang mengatur, memeriksa, menindak atau mengamankan barang bukti, siapa yang mengejar. Dengan cara hunting system, dan penindakan batas kecepatan.

Untuk perencanaan anggaran yang disiapkan polres Klaten untuk satuan lalu lintas tidak mengalami kekurangan anggaran. Dalam perencanaan ini kasat lantas selalu memberikan arahan khusus pada setiap anggota, semua laporan keuangan setelah pelaksanaan kegiatan penindakan pelanggaran harus dipertanggung jawabkan dengan adanya laporan yang nantinya akan diperiksa langsung oleh Kasat Lantas.

4.2.2 Pengorganisasian Unit Turjawali

Dalam pengorganisasian di unit Turjawali ini menyusun kekuatan yang dilibatkan, kanit turjawali memberikan penjelasan dan target yang dicapai, yaitu pelanggar lalu lintas di

wilayah Kabupaten Klaten, menentukan jenis pelanggaran / situasi kerawanan. Pembuatan surat perintah untuk melaksanakan tugas, untuk surat perintah ini biasa dibuat oleh bagian administrasi Polres Klaten kemudian diteruskan kepada satuan satuan fungsi di dalam Polres. Dalam hal ini, unit turjawali dibantu dengan fungsi lain untuk melaksanakan pengaturan, dan diploting oleh bagian administrasi dan operasional Polres, berikut adalah tabel plotting pengaturan pagi di wilayah Klaten.

Tabel 4.10
Pos PAM pagi bulan Maret

NO	NAMA POS	TANGGAL		
		6 S/D 12 MARET	13 S/D 19 MARET	20 S/D 26 MARET
1	2	3	4	5
1	SP.3 M.01 PAKIS	2 CAD. MITRA 03	2 CAD. MITRA 03	2 CAD. MITRA 03
2	SP.3 M.02 DELANGGU	1 CAD. MITRA 03	1 CAD. MITRA 03	1 CAD. MITRA 03
3	SP.4 M.03 KARANG	1 JAGA MITRA 03	1 JAGA MITRA 03	1 JAGA MITRA 03
4	SP.3 M.04 PENGUNGUNG	2 JAGA MITRA 03	2 JAGA MITRA 03	2 JAGA MITRA 03
5	SP.3 KARANGWUNI	AIPTU AGUS R	BRIPKA AHMAD.M	AIPTU SUPRIANTORO
6	SD N 2 BARENG	AIPTU MUSTOFA	BRIGPOL ANDHIKA	AIPTU MURTIJO
7	DEPAN SMP 7 KLATEN	BRIGADIR RUDY K	AIPDA WURI SANTANA	AIPTU I GEDE W
8	SP. 3 SMA 2 KLATEN	AIPDA WURI SANTANA	AIPTU I GEDE W	BRIPKA PRASETONOTO
9	SP. 3 SMK KRISTEN	BRIG ARIS PRAS	BRIPKA HANAFI ANDI	BRIPKA SUSANTO
10	SP.3 SMP 1 KLATEN	2 ANGGT JAGA TKP	2 ANGGT JAGA TKP	2 ANGGT JAGA TKP

Sumber : minops Polres Klaten

Selain melakukan plotting personel, dalam tahap pengorganisasian ini menjelaskan sistem pelaporan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan anggota unit Turjawali. Kanit turjawali memberikan motivasi kepada anggota, karena seorang anggota memiliki motivasi yang tinggi apabila sesuatu yang dilakukan sebanding dengan sesuatu yang akan diterima. Dalam hal ini apabila anggota mempunyai motivasi yang tinggi, ketertiban masyarakat khususnya pelajar SMA dalam berlalu lintas semakin tinggi juga. Seperti wawancara peneliti kepada anggota turjawali briпка Suyanto, beliau mengatakan bahwa :

Motivasi yang diberikan pimpinan pada saat apel meningkatkan motivasi saya untuk melakukan kegiatan dengan baik, untuk menertibkan pelanggar – pelanggar lalu lintas yang ada di Kabupaten Klaten, apalagi pelajar yang sering ugal – ugalan, menggunakan knalpot brong yang meresahkan masyarakat. (wawancara pada tanggal 12 Maret 2017)

Sesuai dengan teori Motivasi oleh Abraham Maslow bahwa “Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah, lima tingkat kebutuhan dikenal sebagai Hirarki Kebutuhan Maslow...” Dalam Polres Klaten ini, Kasat Lantas memberikan dorongan dari tingkatan terbawah hingga tertinggi. Untuk kebutuhan fisiologis sendiri, seorang personel unit Turjawali selaku manusia, pasti mempunyai rasa lapar dan haus, mempunyai keluarga, oleh sebab itu, personel Unit Turjawali harus bekerja agar memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota unit Turjawali harus dilaksanakan dengan optimal pada saat melaksanakan turjawali maupun penindakan pelanggaran. Untuk kebutuhan rasa aman sendiri, sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat Klaten. Anggota Unit Turjawali melaksanakan pengamanan dengan penjagaan, pengawalan, pengaturan, maupun pengawalan kepada pelajar di Kabupaten Klaten. Kebutuhan yang terakhir adalah berprestasi, tidak segan – segan Kasat Lantas Polres Klaten akan memberikan reward kepada anggota yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya anggota Unit Turjawali. Dengan memberikan kesempatan anggota untuk melaksanakan pendidikan kejuruan lalu lintas.

Selain memotivasi anggota, dalam pengorganisasian juga melibatkan instansi terkait seperti dinas perhubungan yang ada di Kabupaten Klaten. Karena pelanggaran yang ada di Kabupaten Klaten juga melibatkan kebijakan dari dinas perhubungan Kabupaten Klaten, kurangnya angkutan umum yang ada di Kabupaten Klaten mengakibatkan menumpuknya kendaraan pribadi khususnya roda dua yang menjadi sarana transportasi pelajar ke sekolah maupun kegiatan – kegiatan lain. Pada saat penulis melakukan pengamatan di SMA Kanisius, 90% pelajar berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan roda dua walaupun belum memiliki SIM.

4.2.3 Pelaksanaan Upaya Unit Turjawali untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA

Pelaksanaan upaya pengurangan pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Kanit Turjawali. Pelaksanaan penindakan pelanggaran yang dilaksanakan oleh satuan Lalu Lintas Polres Klaten dilakukan setiap hari selain hari sabtu dan minggu atau pada saat ada kunjungan dari pejabat VIP. Operasi 2-1 atau operasi penindakan pelanggaran biasa dilakukan di 4 titik di Kabupaten Klaten. Di pertigaan pemda, pos karang (delanggu), dan di pos gatur. Operasi penindakan pelanggaran ini dipimpin oleh seorang perwira, kanit Turjawali IPTU Sarwoko.

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran berlalu lintas di Polres Klaten, yang pertama dengan operasi penindakan pelanggaran atau biasa disebut dengan operasi 2-1. Operasi 2-1 atau operasi penindakan pelanggaran merupakan operasi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian di tempat – tempat rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Operasi penindakan pelanggaran ini melibatkan 20 anggota unit turjawali, yang mempunyai bagian tugas masing – masing. Pembagian tugasnya adalah memberi isyarat kurangi kecepatan, memberhentikan kendaraan, memeriksa kelengkapan kendaraan dan pengemudi, penilangan, mengamankan barang bukti dan sebagai siap sedia yaitu mengejar dan antisipasi untuk pengendara yang tidak mau diberhentikan untuk diperiksa. Untuk Polres Klaten sendiri biasa melaksanakan operasi penindakan pelanggaran di pertigaan depan pemda Kabupaten Klaten. Operasi penindakan pelanggaran dilaksanakan pada jam – jam tertentu seperti pada pukul 15.00 – 17.00 dimana banyak masyarakat melaksanakan aktifitasnya. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota Turjawali Bripda Sam Putra beliau mengatakan bahwa

Operasi penindakan pelanggaran dilaksanakan setiap hari, kecuali sabtu dan minggu atau pada saat ada kunjungan VVIP. Operasi penindakan pelanggaran lebih

menekankan pengecekan kendaraan masyarakat Klaten, apabila pengendara membawa kelengkapan berkendara, maka pengendara kendaraan roda dua dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun apabila tidak membawa kelengkapan dalam berkendara, maka langsung akan diberikan denda tilang kepada masyarakat tersebut. Untuk pelajar biasanya ditilang karena tidak mempunyai SIM. (wawancara pada tanggal 7 Maret 2017)

Dari wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klaten Satuan Lalu lintas sangat berupaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Untuk kelengkapan yang harus ada pada anggota Polres Klaten adalah peluit, megaphone, lampu senter dengan pancaran warna tertentu yang jelas dilihat oleh pemakai jalan, rambu lalu lintas seperti traffic cone, alat komunikasi (HT), kelengkapan perorangan sesuai seragam, ballpoint (tinta hitam atau biru), label barang bukti, alat pelapis penulisan blanko tilang, dan masing – masing anggota wajib membawa surat perintah tugas. Hal ini sesuai dengan program PROMOTER kapolri yang ke empat yaitu peningkatan profesionalisme menuju keunggulan.

Tabel 4.11

Penerimaan Pendistribusian Dan Penggunaan Blanko Tilang Pada Satuan Penindak Bulan Januari S/D Desember 2016

NO	SATUAN PENINDAK	TERIMA	SISA TAHUN LALU	PENINDAKAN	SISA
1	POLRES KLATEN	24000	4062	23902	4160
	JUMLAH	24000	4062	23902	4160

Sumber : Minops tilang Polres Klaten

Dari data diatas yang diperoleh dari minops satuan lalu lintas Polres Klaten, ditemukan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Klaten ini tidak kekurangan blanko tilang. Pada saat melaksanakan operasi penindakan pelanggaran yang disebut operasi 2 – 1, blanko tilang selalu tersedia.

Metode yang kedua adalah *hunting system* (sistem kejar), disebut juga dengan pengejaran. *Hunting System* (sistem kejar) merupakan operasi yang dilaksanakan oleh pihak satuan lalu lintas unit turjawali yang sedang berada di Pos – Pos polisi atau pada saat melaksanakan patroli, hal ini bersifat insidentil dan penindakan ofensif terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan untuk petugas tidak perlu dilengkapi dengan surat perintah tugas. Menurut wawancara yang peneliti laksanakan dengan bripta Sam Putra bahwa

hunting system yang dilakukan kepada pelajar hanya pelanggaran yang kasat mata seperti menggunakan knalpot bronk, tidak memakai kaca spion, tidak memakai helm, berboncengan lebih dari dua. Untuk pelajar yang belum memiliki SIM kan tidak terlihat, jadi selama pelajar menggunakan kelengkapan berkendara ya tidak dikejar untuk ditilang. (wawancara pada tanggal 7 Maret 2017)

Setiap pengejaran ini, polisi berhak menilang masyarakat yang melakukan pelanggaran di daerah Klaten.

Penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan dalam kasus ini adalah penanganan dari masalah yang ada, sebagaimana tugas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten meminimalisir atau bahkan menghilangkan bertemunya niat dan kesempatan pelajar SMA / SMA yang hendak melanggar aturan lalu lintas. Di wilayah Polres Klaten penegakan hukum dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Hal – hal yang dilakukan dalam upaya preventif antara lain :

Pengaturan yang dilakukan anggota Satuan Lalu Lintas dilakukan pada saat jam berangkat dan pulang sekolah. Para personel Polres Klaten, tidak hanya dari Satuan lalu lintas melaksanakan penjagaan di depan sekolah untuk mengatur lalu lintas yang biasanya macet. Karena sebagian besar pelajar SMA menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah. Oleh karena itu selain melakukan pengaturan, para personel Polres Klaten yang terploting melaksanakan penjagaan di depan sekolah juga memberikan edukasi kepada pelajar agar tidak melakukan pelanggaran. Seperti hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan Kasat Lantas AKP Adhytiawarman Gautama Putra bahwa

Didepan sekolah itu biasanya ada yang PH pagi, melibatkan dari fungsi lain, trus kalau ada pelajar yang melanggar, ya paling diingatkan sama anggota, karna kasian kan kalau mau berangkat sekolah nanti terlambat. (wawancara pada tanggal 6 Maret 2017)

Pengaturan pada polres Klaten disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan pada Polres Klaten dan telah dilaksanakan secara optimal oleh personel Polres Klaten yang mendapatkan plotting untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari dilaksanakan pada pukul 06.30 sampai pukul 07.30.

Penjagaan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu apabila ada penjagaan maka para pengguna jalan terutama pelajar SMA yang belum layak menggunakan kendaraan bermotor mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran seperti tidak memakai helm, knalpot tidak standar ataupun jenis pelanggaran lainnya. Dan apabila ditemukan pelanggaran maupun kecelakaan maka para anggota Satuan Lalu Lintas bisa segera melakukan tindakan.

Pengawasan lalu lintas dilakukan untuk melakukan pengaturan sehingga obyek yang dikawal tidak mendapatkan rintangan maupun hambatan selama berada di jalan raya dengan adanya kondisi ini maka pihak yang di kawal akan tiba ditempat tujuan dengan aman tertib dan lancar. Seperti halnya pada saat perkumpulan klub RX King yang berada di Kabupaten Klaten melaksanakan kovo, akan meminta bantuan kepada pihak satuan lalu lintas Polres Klaten untuk dikawal agar tidak mengganggu pengguna jalan lain, pada saat melaksanakan konvoi, seperti yang wawancara yang penulis lakukan dengan Bripda Sam bahwa

Pelajar di Klaten ini biasanya ikut klub motor, tapi yang positif, tidak sampai anarki, untuk perkumpulan ini, biasanya kami undang juga untuk hadir dalam pelaksanaan sosialisasi safety riding di alun-alun. Sehingga dapat terjalin hubungan baik antara pihak kepolisian dengan klub-klub motor yang di Klaten, kalo klub motor itu membutuhkan bantuan kawal, ya kami kawal dengan adanya surat perintah dari atasan.

Yang terakhir adalah pelaksanaan patroli untuk melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan bagi pemakai jalan, menemukan/menindak pelanggar lalu lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Seperti wawancara yang penulis laksanakan dengan Kasat Lantas AKP Adhytiawarman Gautama Putra bahwa

Pada saat patroli, anggota kami memberikan teguran lisan kepada masyarakat yang belum tertib berlalu lintas, tapi untuk pelanggaran yang sudah kelewatan seperti menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan akan kami tilang ditempat, biasanya dilakukan pengejaran terlebih dahulu, pada saat patroli ini, petugas juga bisa melakukan *hunting system* karena pelaksanaan *hunting system* sendiri tidak memerlukan surat perintah.

Dalam patroli pada wilayah hukum Polres Klaten, unit Turjawali melaksanakan tugasnya dengan optimal, sehingga masyarakat khususnya pelajar di wilayah hukum Polres Klaten, segan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti pada tabel 4.5 bahwa pelanggaran di Kabupaten Klaten setiap tahun menurun.

Selain hal tersebut, penindakan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tertulis ditujukan kepada pengemudi yang berasal dari luar kota, menurut wawancara dengan Kanit Turjawali IPTU Sarwoko pada tanggal 8 Maret 2017 di ruang KBO Lantas beliau mengatakan bahwa :

Klaten itu jalur penghubung antara solo ke Yogyakarta, jadi banyak orang yang hanya lewat saja ke klaten. Aslinya ada yang dari Yogya kuliah di Solo atau sebaliknya, jadi kalo pada melanggar ya kasian kalo nanti harus sidang di Klaten. Jadi ya saya beri teguran saja agar tidak melakukan pelanggaran lagi, biasanya itu pelanggaran tidak pakai spion, karna gaya gayaan motor.

Selain karena pengemudi atau pelanggar yang berasal dari luar kota, teguran simpatik ditujukan kepada rambu yang belum memiliki kekuatan hukum atau dalam masa sosialisasi. Hal ini didukung dengan data intel dasar berupa rute jalanan Klaten. Klaten merupakan Kabupaten yang akan berkembang, sehingga perubahan tatanan Kabupaten ini masih banyak terjadi, menyebabkan masyarakat belum tau mengenai hal baru seperti rambu – rambu lalu lintas yang baru dipasang atau dalam tahap sosialisasi.

Yang terakhir adalah karena pelanggar yang bersifat ringan, di Klaten biasanya ada pengemudi yang melawan arus, melewati jalan kecil di samping Jalan Raya. Karena Jalan Raya di Klaten satu jalur dan masyarakat malas untuk memutar jalan karena jaraknya menjadi lebih jauh. Ada juga pelajar SMA yang bonceng lebih dari alasannya karena tidak memiliki motor ke sekolah sehingga harus ikut dengan rekannya, hal tersebut lebih diberikan teguran lisan agar tidak mengulangi lagi nantinya.

4.2.4 Pengendalian terhadap upaya unit Turjawali Satuan Lalu Lintas untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA

Pengendalian dilaksanakan oleh Kasat Lantas, dalam beberapa acara kasat Lantas langsung turun kepada masyarakat untuk mengendalikan anggotanya dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar di Kabupaten Klaten. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan pada saat pelaksanaan sambang desa bersama Kapolres. Apabila ada pendapat dari masyarakat mengenai penindakan pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian khususnya unit turjawali, kasat lantas AKP Adhytiawarman langsung memberikan jawaban kepada masyarakat.

Pengawasan secara tidak langsung melalui laporan dari anggota yang diberikan kepada kanit Turjawali kemudian diteruskan kepada kasat lantas. Sesuai dengan program promotor POLRI bahwa POLRI anti korupsi. Program clean and clear. Kasat Lantas selalu mewajibkan anggotanya untuk benar – benar menyusun secara rinci mengenai anggaran yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam anggaran.

4.3 Faktor yang mempengaruhi upaya unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA

Dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pastinya ditemukan faktor – faktor yang mempengaruhi unit Turjawali dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA di Polres Klaten. Adapun faktor internal adalah faktor – faktor yang terdapat pada instansi itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan luar atau tidak ada pada instansi tersebut.

Sebagaimana sebuah ilmu otonom, manajemen memiliki sarana atau bisa juga disebut dengan alat – alat manajemen, unsur – unsur manajemen atau komponen manajemen. Secara umum, unsur – unsur manajemen yang digunakan yaitu :

a. *Man* (Manusia)

Manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja, sebab manusia dapat bertindak sebagai subjek dan objek dalam setiap

kegiatan. Cukup banyaknya jumlah sekolah di wilayah hukum Polres Klaten membuat unit Turjawali kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya karena kurangnya personel dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan, sehingga membutuhkan dari fungsi lain seperti binmas dan sabhara untuk membantu pengaturan pada pagi hari di depan sekolahan maupun di tempat – tempat yang rawan kecelakaan dan pelanggaran.

Untuk kemampuan personel satuan lalu lintas Polres Klaten, diadakan pelajaran lalu lintas untuk menambah ilmu mengenai satuan lalu lintas di ruang K3i Polres Klaten setelah pelaksanaan apel pagi hari sabtu. Hal ini diperoleh informasi dari wawancara antara peneliti dengan Kasat Lantas AKP Adhytiawarman diruangan Kasat Lantas bahwa

Karena belum semua anggota satuan lalu lintas melaksanakan pendidikan kejuruan lalu lintas, maka saya berinisiatif untuk mengadakan program pembelajaran mengenai lalu lintas di Polres setiap sabtu pagi, jadi yang tidak bertugas ya ikut pembelajaran, nggak lama, Cuma sebentar, tapi menambah ilmu untuk anggota anggota yang masih baru. (Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017)

Dari wawancara tersebut menggambarkan bahwa satuan lalu lintas Polres Klaten mengupayakan agar personel lalu lintas dapat melakukan tugasnya dengan optimal.

Namun pada saat pelaksanaan metode *hunting system*, yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pelajar SMA di Klaten mengatakan bahwa :

Polisi suka cari-cari, trus nanti saya diminta bayar ditempat, waktu saya nggak pake helm, saya bayar 50ribu trus saya disuruh pergi, nggak jadi ditilang. (wawancara: 6 Maret 2017)

Tidak hanya pernyataan dari Kristiawan saja, bahkan pada saat peneliti mewawancarai rekan kristiawan yaitu muhammad sofyman mengatakan bahwa :

Waktu itu saya bayarnya 100ribu, soalnya saya 2 pelanggaran, yang pertama nggak punya SIM, yang kedua nggak pake helm, saya mau sidang bingung, jadi saya bayar aja polisinya, lalu saya disuruh pergi (wawancara : 6 Maret 2017)

Hal ini menunjukan bahwa metode *hunting system* belum dinilai baik oleh masyarakat, karena masih menggunakan budaya lama yaitu jalan damai. Pada saat peneliti melaksanakan wawancara dengan IPTU Sarwoko selaku Kanit Turjawali, beliau mengatakan bahwa :

Hal itu mungkin hanya oknum saja yang melakukan pungli, atau jalan damai. Apabila saya menemukan langsung oknum tersebut, saya akan langsung berikan sanksi kepada anggota dan saya bawa ke provost untuk ditindak lebih lanjut. (wawancara : 8 Maret 2017)

Dari pernyataan IPTU Sarwoko diatas, bahwa metode *hunting system* dinilai masyarakat sebagai pencarian pelanggaran yang dibuat – buat agar masyarakat menjadi bersalah. Hal tersebut hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja, namun menyebabkan berkurangnya citra baik kepolisian. Selain hal tersebut, ada pelajar SMA yang mengatakan bahwa

Pada saat saya ditilang, bapak saya ditelepon, suruh datang trus saya diberi teguran lisan sama pak polisinya, habis itu saya nunggu bapak saya sampai datang, baru saya boleh pergi buk. Memang waktu itu saya salah, soalnya nggak pake helm ke sekolah. (wawancara pada tanggal 12 Maret 2017)

Dari hasil wawancara dengan pelajar SMA di Kabupaten Klaten, faktor manusia yang berasal dari personel satuan lalu lintas masih dianggap kurang baik bagi masyarakat.

b. Money

Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Keberhasilan kegiatan akan dipengaruhi oleh besar – kecilnya uang / anggaran yang digunakan dalam operasional kegiatan. Tidak hanya faktor manusia saja yang mempengaruhi pelaksanaan unit turjawali dalam mengupayakan berkurangnya pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar, tetapi faktor anggaran juga. Anggaran untuk unit turjawali sudah tercukupi dan kanit turjawali dapat membagi anggaran sehingga unit turjawali tidak kekurangan dalam hal anggaran. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan tugas unit turjawali di Polres Klaten sudah optimal. Sesuai dengan wawancara yang peneliti laksanakan bersama Kasat Lantas Polres Klaten AKP Adhytiawarman Gautama Putra bahwa

Saya setiap kegiatan selalu mengecek laporan keuangan, saya nggak mau anggota saya ada yang macam – macam dengan anggaran, dan kebetulan anggota saya memanfaatkan anggaran dengan baik, sehingga belum ada yang kekurangan sampai saat ini, dan kegiatan berjalan dengan lancar, seperti pada pelaksanaan penindakan pelanggaran, belum pernah sampai kekurangan blanko tilang atau pena untuk menulis. (wawancara pada tanggal 6 Maret 2017)

Menurut penjelasan dari Kasat Lantas, faktor uang inilah yang mempengaruhi personel turjawali dalam melaksanakan tugasnya. Karena kanit Turjawali mampu membagi anggaran dengan baik, maka anggota tidak sampai kekurangan dalam melaksanakan tugasnya.

c. *Materials* (Bahan – bahan)

Material merupakan salah satu sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Material atau bahan – bahan yang dimaksud adalah materi atau bahan – bahan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penindakan pelanggaran maupun turjawali seperti traffic cone, blanko tilang, rompi, pluit, bolpoint dan label barang bukti.

Dalam pelaksanaan unit turjawali Polres Klaten didukung dengan bahan – bahan yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan turjawali dan penindakan pelanggaran dalam observasi yang peneliti laksanakan tidak ada kekurangan material, semua anggota sudah memiliki sarana dalam tugasnya masing – masing. Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2017 dengan bapak Sam selaku anggota unit Turjawali bahwa

Pada saat melakukan penindakan pelanggaran setiap anggota kan diwajibkan untuk berpenampilan yang rapi, tidak lupa membawa pluit, pena, dan blanko tilang, untuk blanko tilang di Polres Klaten sendiri masih bisa teratasi, karena selalu tersedia dan tidak pernah kekurangan. Kalo rompi untuk satlantas ya itu udah punya masing-masing dan setiap anggota pasti malu kalo pake rompi yang udah jelek, biasanya pengadaan sendiri beli yang bagus.

Dari wawancara diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa material yang digunakan di unit turjawali Polres Klaten tidak kekurangan, apabila ada yang kurang, setiap anggota masih bisa untuk mengatasinya. Untuk pembagian Polres sendiri hanya ada satu tahun sekali, selanjutnya perawatan dari anggota unit Turjawali sendiri.

d. *Methods* (Metode)

Methods merupakan suatu tata kerja yang baik guna memperlancar jalannya pekerjaan. Dalam pelaksanaan kegiatan turjawali dan penindakan pelanggaran diperlukan metode – metode kerja yang mendukung pelaksanaan turjawali dan penindakan pelanggaran. Namun meskipun dalam pelaksanaan kegiatan turjawali dan penindakan pelanggaran menggunakan metode yang sesuai dengan SOP polres Klaten.

Metode yang digunakan adalah operasi 2-1 yang disebut penindakan pelanggaran, dibutuhkan kerja sama yang baik pada setiap anggota, seperti pengamatan yang dilaksanakan

oleh peneliti pada saat pelaksanaan penindakan pelanggaran, setiap anggota mampu bekerja sama dengan baik, dengan cara melaksanakan tugasnya masing – masing.

e. *Machines* (Mesin)

Mesin merupakan alat – alat yang digunakan untuk mempercepat proses guna mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan turjawali dan penindakan pelanggaran. Dalam hal ini pada unit turjawali sudah dibekali dengan 6 motor besar lalu lintas dan 4 mobil patwal, hal ini dinilai cukup memfasilitasi dalam mobilitas anggota satuan lalu lintas pada saat pelaksanaan turjawali maupun penindakan pelanggaran. Untuk pelaksanaan *hunting system* anggota unit Turjawali masih terbebani, karena dilaksanakan pada saat anggota melaksanakan penjagaan di Pos jaga tetap dan apabila melihat adanya pelanggaran yang terjadi, harus mengejar dengan kendaraan pribadi yang dimiliki anggota, hal ini bensin harus dibeli sendiri oleh anggota unit Turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten dan belum di anggarkan dalam anggaran unit Turjawali Polres Klaten. Seperti pada wawancara yang dilaksanakan dengan Bripda Samputra pada tanggal 7 Maret 2017 bahwa

Saya waktu itu berjaga di Pos jaga dan sehari bisa ngejar sampai 10 sepeda motor, ya kalo dikejar langsung berhenti ya nggak ngabisin bensin banyak-banyak. Tapi ada juga yang harus dikejar sampe 1km dulu baru mau berhenti, malah ada yang dikejar tapi nggak mau berhenti akhirnya yaudah dibiarkan saja, biasanya anak muda yang masih bisa kebut-kebutan, kalo gitu ya biasanya bensin ditanggung saya sendiri, kan motor juga motor saya sendiri. Tapi ada juga nggak usah dikejar, trus waktu melaksanakan pengaturan di depan pos jaga langsung aja disuruh minggir, kalo gitu, kami nggak rugi bensin.

Informasi yang penulis peroleh dari bripda Samputra menunjukkan bahwa masih ada material dari satuan unit turjawali yang kurang, yaitu bahan bakar untuk melaksanakan *hunting system*. Karena bahan bakar yang terdaftar pada anggaran unit Turjawali Polres Klaten dianggarkan untuk kendaraan dinas, seperti mobil patroli dan kendaraan roda dua untuk melaksanakan patroli.

Kendala eksternal yang dihadapi dalam kegiatan penindakan pelanggaran ini antara lain, sulitnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, khususnya pelajar SMA. Klaten merupakan daerah yang cukup luas dapat dilihat dari intel dasar Polres Klaten, jadi jangkauan anak untuk ke sekolah ada yang berjarak sangat jauh, sehingga sulit untuk ditempuh apabila menggunakan angkutan umum atau bersepeda. Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara dengan Guru SMA Kanisius Klaten menerangkan bahwa :

Pelajar ini pada bawa motor, rumahnya jauh-jauh. Kalo dilarang bawa motor karna belum punya SIM, malah jadi nggak mau masuk sekolah. Pernah diberikan sosialisasi pembuatan SIM, tapi pada belum mau buat SIM, karena mahal katanya kalo buat SIM. (wawancara : 6 Maret 2017)

Kedua adalah pihak orang tua yang memberi kebebasan anaknya untuk menggunakan kendaraan ke sekolah. Mereka beralasan dengan menggunakan sepeda motor lebih efisien dan cepat dibanding naik angkutan umum. Alasan yang keluar dari para generasi muda ini sangat simpel dan jelas, mereka beralasan karena kesibukan, sebagian lagi beralasan tidak adanya angkutan umum yang masuk ke lingkungan sekolah dan tidak adanya bus sekolah. Dengan demikian maka pantas jika banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar yang beresiko mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dari dinas perhubungan sendiri tidak mengeluarkan trayek angkutan umum di sekitar sekolah. Angkutan umum hanya ada di dekat terminal yang lokasinya jauh dari sekolah –

sekolah di Kabupaten Klaten. Berkembangnya zaman, masyarakat juga tidak ada yang berminat untuk membuka jasa pelayanan angkutan umum di Klaten karena takut mengalami kerugian lantaran masyarakat Kabupaten Klaten sudah memiliki kendaraan pribadi masing – masing. Apabila tidak adanya jalur angkutan umum pada Polres Klaten, maka pelanggaran pelajar semakin meningkat dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada kalangan pelajar di Kabupaten Klaten. Berikut penulis sajikan data kecelakaan yang terjadi pada Kabupaten Klaten selama tahun 2016.

Tabel 4.12

Data Kecelakaan pada tahun 2016 di Kabupaten Klaten

N O	URAIAN	TAHUN 2016
1	KEJADIAN	770
2	- MD	164
3	- LB	9
4	- LR	1341
5	- MATERIIL	1. 389.400.000

Sumber : minops unit laka Polres Klaten

Berdasarkan kecelakaan yang ada pada data diatas, penyebabnya tak bisa dipungkiri adalah pelanggaran lalu lintas yang ada pada Kabupaten Klaten. Dan data kecelakaan yang penulis peroleh dari Korlantas Polri, untuk kecelakaan dengan umur terbanyak adalah pada umur 15 – 19 tahun yang berarti adalah kecelakaan yang dialami oleh pelajar SMA.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis data terhadap upaya unit turjawali satuan lalu lintas polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada kalangan pelajar sesuai dengan konsep dan teori yang terkait, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Pelanggaran yang terjadi pada Polres Klaten disebabkan karena aktivitas yang terjadi pada masyarakat Klaten. Pelajar diharuskan untuk bersekolah setiap hari, tidak hanya sekolah saja yang dilakukan oleh pelajar, namun ada kegiatan lain seperti melaksanakan bimbingan belajar, dan ekstrakurikuler di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk Kabupaten Klaten sendiri memiliki jumlah angkutan umum yang sedikit. Berdasarkan tabel 4.9 mengenai data angkutan umum yang berada di Kabupaten Klaten, hal tersebut mendorong masyarakat untuk mengendarai kendaraan pribadi, khususnya pelajar. Untuk upaya unit turjawali satuan lalu lintas dibagi menjadi dua yaitu upaya prefentif dan upaya represif, hal ini masih menjadi kendala bagi Polres Klaten, karena walaupun terjadi penurunan angka pelanggaran pada tiga tahun terakhir, pada saat penulis melaksanakan penelitian lebih dalam, angka pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA mengalami kenaikan. Sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, Polisi khususnya pihak satuan lalu lintas harus melakukan upaya yang lebih baik, dengan terobosan terobosan yang lebih inovasi untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMA.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi unit Turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten adalah faktor manusia, dari anggota Satuan Lalu Lintas Polres Klaten masih ada anggota yang melakukan pungli, sehingga pelajar SMA di Kabupaten Klaten tidak segan untuk melakukan pelanggaran, karena dengan membayar kepada anggota satuan lalu lintas, masalah dapat terselesaikan. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Klaten selalu mengedepankan laporan, setiap kegiatan harus dilaporkan kepada Kasat Lantas Polres Klaten, agar setiap anggaran yang keluar dari unit Turjawali dapat dipertanggung jawabkan. Sesuai dengan program PROMOTER Polri dengan memanfaatkan anggaran yang ada, Polres Klaten berhasil dalam pemanfaatan anggaran yang ada, sehingga tidak sampai kekurangan anggaran. Dari metode yang digunakan oleh unit Turjawali satuan lalu lintas Polres Klaten, metode yang dilaksanakan Polres Klaten sudah berjalan sesuai standart operasional prosedur yang ada di Polres Klaten, untuk ketentuan personel yang mengikuti penindakan pelanggaran pada Polres Klaten sudah sesuai dengan tugas masing-masing, berjumlah 20 sampai 25 anggota pada saat pelaksanaan penindakan pelanggaran. Untuk faktor pendukung dari luar kepolisian adalah dari pihak sekolah yang selalu mengingatkan untuk para siswa tidak menggunakan kendaraan bermotor apabila belum memiliki SIM. Sekolah juga menghimbau kepada orang tua agar mengawasi anaknya dalam berkendara, sehingga tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Orang tua dari siswa SMA juga harus berperan dalam hal ini, untuk tidak tergiur dengan adanya tawaran murah dari dealer kendaraan roda dua dan membelikan anaknya kendaraan pribadi untuk bepergian tanpa memiliki SIM. Orang tua juga dapat meluangkan waktunya untuk mengantar setiap kegiatan dari anaknya untuk bersekolah. Agar orang tua tidak khawatir pada saat anaknya pergi maupun pulang dari sekolah.

5.2 Saran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlunya upaya unit turjawali satuan lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar. Maka dari itu, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Kasat lantas bekerja sama dengan dinas Perhubungan untuk mengadakan jalur sepeda untuk pelajar, sehingga pelajar nyaman apabila bersekolah menggunakan sepeda.
- Kasat Lantas bekerja sama dengan dinas Perhubungan untuk mengkondisikan adanya angkutan umum di daerah Klaten Kota ataupun jalur sekolah sehingga pelajar dapat menggunakan angkutan umum untuk mobilitasnya ke sekolah.
- Kapolres memerintahkan kasat Binmas untuk membantu melakukan sosialisasi tentang lalu lintas agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.
- Kasat lantas membuat program penindakan pelanggaran di sekolah, apabila yang melanggar ketentuan dalam berlalu lintas tidak diperbolehkan pulang sebelum dijemput oleh orang tua / wali dari pelajar tersebut.
- Kasat lantas mengajukan anggotanya untuk mengikuti pendidikan kejuruan lantas agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.
- Satuan Lalu Lintas Polres Klaten membuat grup menggunakan sosial media seperti *whatsapp* dan *line*. yang berisikan pelajar SMA di wilayah Klaten untuk memelopori program keselamatan dalam berlalu lintas.
- Satuan Lalu Lintas mengadakan lomba antar SMA, untuk siswa yang tertib dalam berlalu lintas akan diberikan hadiah berupa penghargaan sebagai sekolah tertib lalu lintas dan tiap siswa di sekolah tersebut diwajibkan untuk menggunakan stiker tertib

lalu lintas, perlombaan ini diadakan setiap bulan sekali, sehingga tiap sekolah dapat berlomba-lomba untuk menertibkan murid-muridnya.

- h. Mengadakan perkumpulan pelajar SMA yang ada di Kabupaten Klaten di alun-alun untuk mengadakan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas dan diberikan khusus untuk pelajar SMA untuk membuat SIM tanpa mengantri dengan masyarakat lain.

REFERENSI

Buku

- Akademi Kepolisian. 2013. Fungsi Teknis Lalu Lintas. Semarang : Akpol
Gubernur Akademi Kepolisian, Keputusan Nomor : KEP/157/XII/2016. Petunjuk Teknis
Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*.
Bandung: CV Alfabeta.
- Terry, George. 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang – undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Cara Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Skripsi

- Friska Nufriada Rohmadhona. 2015. “Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
Terhadap Pelajar oleh Unit Turjawali Sat Lantas dalam Rangka Menciptakan
Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”. Skripsi. Akpol
Semarang.
- Muthia Khansa Nurwijaya. 2016. “Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dalam
Rangka Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Gresik”. Skripsi. Akpol
Semarang.

Sumber Internet

- Berita Klaten, <http://www.klaten.info/berita/angkutan-umum-terus-berkurang-2.html>. 03
April 2017.
- Infrastruktur Klaten, <http://klatenkab.go.id/infrastruktur/perhubungan/> 04 April 2017.
- Kecelakaan lalu lintas, <http://korlantas.polri.go.id/> 12 Desember 2016.
- Prihartanta, Widayat. 2015. ‘Teori-Teori Motivasi’ Dalam Jurnal. Hal 5 – 6.
- Program Prioritas Kapolri, <https://promoter.polri.go.id/landing/>. 02 Februari 2017.